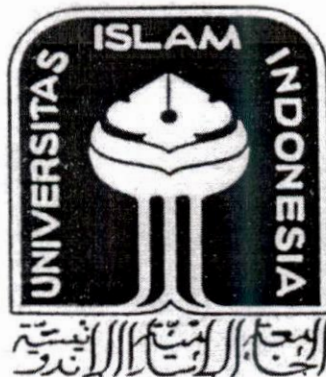


**PARTISIPASI MASYARAKAT
TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(Studi Analisis terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
di MI Miftahul Huda Jati Karang Trenggalek)**



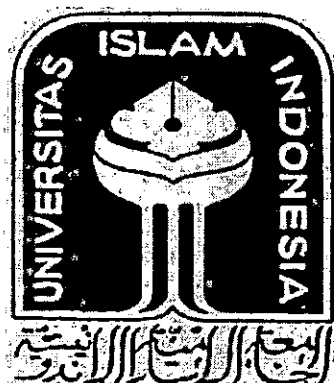
Oleh:
Isnen
NIM: 08913172

TESIS

Diajukan kepada
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2011**

**PARTISIPASI MASYARAKAT
TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(Studi Analisis terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
di MI Miftahul Huda Jati Karang Trenggalek)**



Oleh:

Isnen

NIM: 08913172

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

TESIS

Diajukan kepada
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2011**



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 339/PS-MSI/Peng./III/2011


TESIS berjudul : **PARTISIPASI MASYARAKAT
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (**
terhadap Implementasi Manajemen Berbasis
Miftahul Huda Jati Karangen Trenggalek)

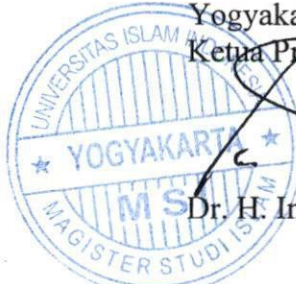
Ditulis oleh : Isnen

N. I. M. : 08913172

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Mag
Pendidikan Islam

Yogyakarta, 17 M
Ketua Program

Dr. H. Imam Effendi





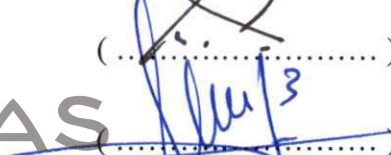




PROGRAM PASCASARJANA
 MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
 Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Isnen
 Tempat/tgl lahir : Trenggalek, 12 Nopember 1975
 N. I. M. : 08913172
 Konsentrasi : Pendidikan Islam
 Judul Tesis : **PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (Studi Analisis terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di MI Miftahul Huda Jati Karang Trenggalek)**

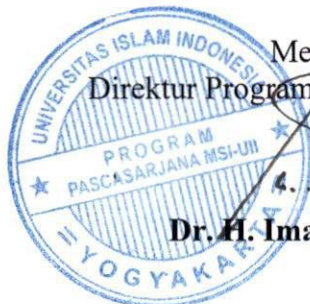
Ketua	: Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag	
Sekretaris	: Drs. H. Hajar Dewantara, M.Ag	
Pembimbing	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	
Penguji	: Dr. H. Imam Effendi, MA	
Penguji	: Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA	



Diuji di Yogyakarta pada tanggal 10 Maret 2011

Pukul : 13.00–14.00 WIB

Hasil / Nilai : **84,30 / B**



Mengetahui
 Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No. : 942/PS-MSI/ND/III/2011

TESIS berjudul : **PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (Studi Analisis
terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di MI
Miftahul Huda Jati Karanganyar Trenggalek)**

Ditulis oleh : Isnen

NIM : 08913172

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 8 Maret 2011

Ketua Program

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Dr. H. Imam Effendi, MA



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. & Fax (0274) 523637
e-mail: Info@msi-iii.net

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (Studi Analisis
Terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
di MI Miftahul Huda Jati Karang Trenggalek)**

Ditulis Oleh : Isnen, S.Ag

N I M : 08913172

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan tim penguji tesis Magister Studi Islam Program pascasarjana Universitas Islam Indonesia

UNIVERSITAS
Yogyakarta, 15 Januari 2011
Pembimbing

ISLAM
INDONESIA

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MOTTO

ليس الفتى من يقول هذا أبى لكن الفتى من يقول هاأناذا

“ Bukanlah pemuda seseorang yang mengatakan inilah bapakku, tetapi yang dikatakan pemuda adalah dia yang berani mengatakan inilah aku.”¹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹ Imam, Haromain, Asy'ri. 2009. "Pemuda". Dalam *Mimbar Pembangunan Agama* XXXIX (277):18. Surabaya.

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (Studi Analisis Terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di MI Miftahul Huda Jati Karang Trenggalek)

Oleh : Isnen

Ada empat alasan yang menjadi dasar untuk meneliti partisipasi masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan di MI Miftahul Huda. Pertama, mengingat MI Miftahul Huda merupakan sebuah institusi pendidikan nasional yang memiliki peran ganda, yaitu peran pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peran membangun karakter bangsa dengan memiliki nilai-nilai moral religius. Kedua, madrasah juga memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab untuk menghilangkan dikotomi pendidikan. Ketiga, MI Miftahul Huda merupakan sekolah yang memiliki partisipasi tinggi. Keempat, pada awalnya rumusan tentang KS/M memiliki wewenang dan peran yang strategis, namun dalam implementasinya lembaga ini dianggap bumerang bagi kepala sekolah.

Penelitian ini, mengkaji tiga aspek secara mendalam, yaitu : pertama, bentuk lembaga partisipasi masyarakat di MI Miftahul Huda; kedua, upaya lembaga partisipasi masyarakat dalam mendorong masyarakat berpartisipasi terhadap MI Miftahul Huda; dan ketiga, pola kerja lembaga partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Miftahul Huda.

Pendekatan yang dipilih, untuk mengungkap keempat aspek tersebut adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan, angket dan dokumentasi.

Hasil penelitian secara umum menunjukkan, bahwa MI Miftahul Huda merupakan sekolah yang bermutu dan memiliki partisipasi yang tinggi. Secara khusus dapat diuraikan berikut ini: (1) bentuk lembaga partisipasi masyarakat terhadap madrasah diwadahi dalam empat lembaga partisipasi, yaitu: (a) partisipasi masyarakat luas atau *stakeholders* dalam KS/M. Untuk komite dibagi dua, yaitu: Badan Pengurus Harian (BPH) dan Badan Kehormatan (BK). BPH fokus pada persoalan pengelolaan keuangan sekolah yang transparan, akuntabel dan demokratis, dan menyadarkan masyarakat pentingnya berpartisipasi dan BK lebih pada pengembangan pemikiran kurikulum, proses, dan pemberdayaan SDM. (b) partisipasi orang tua siswa terwadahi dalam POS, difokuskan pada masalah finansial, jasa, dan barang. (c) partisipasi alumni lebih pada publikasi dan pencitraan (*boulding image*). (d) partisipasi masyarakat melalui patnership saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) melalui *public relation* (humas). (2) upaya lembaga partisipasi masyarakat untuk mendorong masyarakat berpartisipasi terhadap MI Miftahul Huda secara umum ada dua pendekatan, yaitu (a) pendekatan bahasa keagamaan dan ideologis dan (b) pendekatan motivasi kebutuhan pemenuhan diri (*self-fulfilment*) atau pendekatan mutu; (3) pola kerja lembaga partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu melalui: (a) totalitas sistem administrasi dan (b) totalitas jaminan mutu.

Kata-kata kunci: partisipasi, masyarakat, sekolah/madrasah.

ABSTRACT

THE PUBLIC PARTICIPATION IN INCREASING THE QUALITY OF EDUCATION

(Analysis Study to The Implementation of School Based Management at MI Miftahul Huda Jati Karanggen Trenggalek)

By : Isnen

There are four basic reasons for researcher in doing research about the public participation in increasing the quality of education in MI Miftahul Huda. First, MI Miftahul Huda is a national education institute so that it has double function, namely to develop knowledge and technology and to build national characteristic which has religious moral values. Second, MI Miftahul Huda is the school that has high participation. Third, for the first time, the formulation of KS/M consider strategic authority and role, but, in the implementation, this institution is considered as thread-to-head master.

This research discusses three aspects. First, the type of public participation at MI Miftahul Huda; second, the efforts of public participation agency in encourage the society to participate in MI Miftahul Huda; third, the frame work of public participation agency increase the quality of education at MI Miftahul Huda.

To explain the three aspects above, the researcher user qualitative research and interview method, observation, questionnaire, and documentary.

Generally, the results of research show that MI Miftahul Huda represents as a school with good quality and high participation. Especially, it can be explained that: (1) the types of public participation at school can be retained in the four public participation agencies, namely (a) wide public divided into two kinds, Regular Managing Agency (RMA) and Board of Honor (BH). RMA focuses on the issue of transparent, accountable, and democratic school financial management. they should enlighten to society about the importance of public participation. BH focuses more on the curriculum, process and empowerment of Human Resource Management; (b) The student-parental participation may come into POS, focused on financial, service and goods issues; (c) alumnus participation must be concerned into publication and image building; (d) public participation may be sensed through mutual partnership (*mutualism symbiosis*) and through public relation; (2) the efforts of madrasah and public participation agencies will be needed to support public participation at MI Miftahul Huda. In general, two approaches have been considered: (a) religious and ideological approaches and (b) motivational approach for self-fulfillment or quality approach; (3). the working pattern of public participation to make-up of quality of education at MI Miftahul Huda. It becomes evident through: (a) administration system totality and (b) quality insurance totality.

Keywords: participation, public, school/madrasah.

TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 22 januari 1988

A. Konsunan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik dibawahnya)
خ	Kha'	kh	-
د	d	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	şad	ş	s (dengan titik dibawahnya)
ض	dud	d	d (dengan titik dibawahnya)
ط	ta	t	t (dengan titik dibawahnya)
ظ	za	z	z (dengan titik dibawahnya)
ع	'ain	'	Koma dibalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-

ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	wawu	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	hamzah		sposrsof
ي	yà'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syadah, ditulis rangkap احمدية ditulis *Ahmadiyah*

C. Ta'Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

جماعة Ditulis Jama'ah.

2. Bila dihidupkan ditulis t

كرامة الاولياء Ditulis *karamatul-aulya*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a kasrah ditulis I, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A Panjang ditulis a, panjang ditulis , dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + y I tanpa dua titik yang dimatikan ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan spostrof (').

انتم Ditulis *a'antum*

مؤنث Ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al- القرآن Ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila mengikuti huruf syamsiyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya الشيعه Di tulis *as-Syi'ah*.

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam rangkaian Frasa dan kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
حيش الاسلام Ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islam*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji bagi Allah SWT., Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah SWT Yang Maha Agung dan pekasa, Pemilik kerajaan langit dan bumi, yang telah menganugerahkan Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW., bagi keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat nanti.

Penulis menghaturkan terimakasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan tesis ini. Untaian kata terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec selaku Rektor UII Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Dadan Muttaqien, SH.M.Hum selaku Dekan FIAI MSI-UII Yogyakarta
3. Bapak Dr. H. Imam Effendi, M.A. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Drs. H. Syarief Zubaidah, M.Ag selaku Sekretaris Program FIAI yang memberikan kemudahan dalam proses pendidikan di program Pascasarjana MSI-UII Yogyakarta, juga seluruh staf Akademik yang dengan keramahan dan kesungguhannya telah melayani penulis selama studi di Program Pascasarjana MSI-UII Yogyakarta ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS sebagai dosen pembimbing yang berkat kesabaran beliau tesis ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana MSI-UII Yogyakarta kelas K, yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis selama masa studi dan menuntun pola pikir rasioanal, realistis, terarah, dapat dipahami dan memudahkan dalam pengimplementasiannya.
6. Bapak Drs. H. Ngudiono, M.Ag selaku kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, yang memberikan kemudahan dalam penelitian ini.
7. Istriku tercinta Suci Islamiati yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi, disamping do'a dan harapan tinggi yang dinantikan.
8. Kawan-kawan di Pascasarjana MSI-UII Yogyakarta kelas K, yang telah memberikan motivasi atas kesuksesan studi magister Studi Islam.
9. Bapak M. Zuhrofudin, S.Ag selaku kepala MI Miftahul Huda Jati Karanganyar Trenggalek.
10. Seluruh Dewan Guru, Pegawai administrasi, Komite madrasah, Orang tua Siswa, Alumni dan asyarakat yang telah banyak membantu memberikan bahan dan masukan untuk penelitian penulis.

Akhirnya penulis berharap, semoga karya sederhana ini dapat memberikan setitik manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan khazanah keilmuan pada umumnya. Amien. Ya Robbal alamiin.

Yogyakarta, 15 Januari 2011

Penulis,


Isnen

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan masalah	8
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MBS	
A. Partisipasi Masyarakat.....	23

1. Pengertian Partisipasi	23
2. Pengertian Masyarakat	25
3. Studi Teoritik Konsep partisipasi Masyarakat.....	26
4. Partisipasi Masyarakat dalam pendidikan	34
5. Bentuk Partisipasi Masyarakat	38
6. Partisipasi masyarakat Terhadap Sekolah Berbasis Agama	39
B. Partisipasi Masyarakat dalam Konsep MBS	49
1. Latar Belakang Historis MBS.....	51
2. Tujuan dan Manfaat MBS	53
3. Alasan Penerapan dan Kebijakan Dasar MBS	55
4. Dua Pilar MBS.....	57
C. Pola Kerja Partisipasi Masyarakat.....	61
1. Kriteria Komite Sekolah Pendukung Partisipasi	67
2. Standar dan Rantai Kinerja Partisipasi Masyarakat	69
BAB III : GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Sejarah Perkembangan MI Miftahul Huda.....	73
a. Letak Geografis	74
b. Visi dan Madrasah.....	75
c. Struktur Organisasi.....	76
B. Keadaan Tenaga Guru dan Siswa.....	77
C. Program Unggulan dan Fasilitas Pendidikan.....	79

**BAB IV : ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI MI MIFTAHUL
HUDA**

A. Bentuk Lembaga Partisipasi Masyarakat di MI Miftahul Huda.....	81
B. Upaya Pendorong Partisipasi Masyarakat Di MI Miftahul Huda.....	93
C. Pola Kerja Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MI Miftahul Huda.....	103
D. Analisis Data.....	114
E. Hasil Analisis.....	119

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	127

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kebutuhan mutlak, terutama dalam menghadapi perubahan dan perkembangan yang demikian pesat di era global ini.

Hasil dari penelitian pengendalian mutu pendidikan menyatakan bahwa pendidikan memegang peranan kunci dalam pengembangan sumber daya manusia dan insan yang berkualitas. Memang secara kuantitas, kemajuan pendidikan di Indonesia cukup menggembirakan, namun secara kualitas perkembangannya masih belum merata.² Hal ini menjadikan bangsa Indonesia jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Singapura. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Karena dengan meningkatkan kualitas pendidikan, pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan telah dan terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu upaya tersebut adalah dengan dibentuknya Badan Akreditasi Nasional yang bertugas untuk mengakreditasi sekolah-

² Sukmadinata, Nana Syaodih, et al, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip dan Instrumen)*. Bandung: Refika Aditama, 2006, hal 3

sekolah yang ada di Indonesia.

Di Indonesia dalam konteks persekolahan terdapat dua klasifikasi utama, yaitu sekolah nasional dan sekolah asing. Sekolah nasional terdiri dari sekolah swasta dan sekolah negeri. Sekolah tersebut secara kualitas, sebagai hasil dari akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional, dibagi menjadi tiga yaitu sekolah standar, sekolah mandiri dan sekolah berstandar internasional. Sekolah standar adalah sekolah yang memiliki nilai B dan C, sedangkan sekolah mandiri adalah sekolah yang memiliki nilai A.

Adapun kelompok sekolah ketiga, yaitu sekolah berstandar internasional adalah sebuah sekolah nasional kelompok mandiri yang menjalani sebuah proses peningkatan kualitas sekolah yang berkesinambungan sehingga nantinya mempunyai standar internasional.³ Ada beberapa komponen yang harus ditingkatkan oleh sekolah nasional agar kualitas komponen-komponen tersebut diakui secara internasional. Komponen-komponen yang akan ditingkatkan kualitasnya tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah itu sendiri sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Konsep MBS digulirkan bersamaan dengan bergulirnya tema besar dalam kerangka reformasi dan demokratisasi pendidikan, yaitu pada tahun 1999. Secara konseptual, MBS dipahami sebagai salah satu alternatif pilihan formal untuk mengelola struktur penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama

³Samtono. "SNBI Manajemen Peningkatan Mutu SMA menuju Sekolah Nasional Bertaraf Internasional", dikutip dari <http://www.sma1-sltg.sch.id/> / accessed 6 Oktober 2010.

peningkatan. Konsep ini menempatkan redistribusi kewenangan para pembuat kebijakan sebagai elemen paling mendasar, untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan⁴.

Selanjutnya menurut Slamet dalam Pelangi Pendidikan⁵, MBS adalah model pengelolaan sekolah yang mendasarkan pada kekhasan, karakteristik, kebolehan, kemampuan, kebutuhan sekolah dan bukannya perintah dari atasan. Dengan batasan ini maka MBS menjamin adanya keberagaman dalam mengelola sekolah asal tetap dalam koridor kebijakan pendidikan nasional. Tidak ada lagi penekanan pada keseragaman, akan tetapi menjamin adanya keberagaman. Dengan definisi ini, maka sekolah harus diberi otonomi dan keluwesan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya pendidikan di sekolahnya. Mengingat MBS memberikan otonomi lebih besar, maka sekolah harus lebih mandiri. Dengan kemandirian ini, maka sekolah harus melibatkan warga sekolah dan masyarakat sekitarnya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya karena ketergantungan terhadap pemerintah mulai berkurang.

Keikutsertaan dan kesadaran masyarakat untuk memikul tanggung jawab pendidikan merupakan suatu tuntutan yang harus diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pendidikan. Karena hal ini sesuai dengan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dalam PP No 20/2003 yaitu:

⁴ Abu-Duhou, Ihtisam, *School Based Management*, Terjemahan Norlamin Aini Suparto, Jakarta: PT Logos Wucana Ilmu, 2002, hal xv

⁵ Slamet, "MBS, Life Skill, KBK, CTL dan Saling Keterkaitannya", *Pelangi Pendidikan*, Edisi III Desember 2005, hal 13 - 25.

1. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi manusia.
2. Memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
3. Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Masyarakat, sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 20 tahun 2003, memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Adapun kewajibannya adalah memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Lebih lanjut partisipasi masyarakat dalam pendidikan bisa meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Keikutsertaan masyarakat ini dapat diwujudkan dalam bentuk Komite Sekolah atau Dewan Pendidikan.

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.

Salah satu tujuan dibentuknya komite sekolah adalah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.

Seiring dengan komitmen untuk menjadikan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, pada saat ini telah terjadi perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan. Dalam sistem desentralisasi, daerah mempunyai otonomi penuh dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, sehingga dengan otonomi tersebut daerah mempunyai peran yang lebih banyak dalam merumuskan, memikirkan dan meningkatkan partisipasi rakyatnya.

Bila otonomi pendidikan dimengerti sebagai proses kemandirian sebuah sekolah (lembaga) dalam mengelola segenap sumber daya yang ada, maka dunia pendidikan harus berjalan sesuai dengan 6 tolok ukur keberhasilan desentralisasi pendidikan, yakni kepentingan nasional, mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan, pemerataan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas⁶. Karenanya, untuk menunjang keberhasilan implementasi otonomi pendidikan perlu dialog dengan masyarakat sebagai sumber dan induknya. Dialog dimaksudkan untuk mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi, serta mencari terobosan-terobosan dan pemikiran baru untuk mengembangkan dunia pendidikan.

⁶ Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta, Bigraf Publishing, 2000, hal. 44

Dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, maka penyelenggaraan pendidikan harus mengacu pada kepentingan masyarakat yang kompleks dan terus berubah, karenanya harus dapat menyerap aspirasi anggota masyarakat dan dapat mendayagunakan potensi masyarakat dan daerah.

Reformasi merupakan era baru, era keterbukaan. Reformasi ditandai dengan dimulainya kehidupan demokrasi seluas-luasnya. Berbagai tuntutan yang dilakukan oleh segenap elemen masyarakat termasuk di dalamnya insan pendidikan terhadap pemerintahan baru, atas hak-hak otonominya. Hari demi hari bergulir isu otonomi, akhirnya Presiden BJ. Habibie pada tanggal 7 Mei 1999 mengeluarkan UU No. 22/1999 tentang pemerintahan Otonomi Daerah.

Tujuan dilimpahkannya pelaksanaan pendidikan kepada pemerintah daerah seperti tercantum dalam konsideran UU No.22/1999, adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta mendayagunakan potensi dan keanekaragaman daerah dengan tanpa mengabaikan persaingan dunia global (*global village*).⁷

Ada dua macam otoritas kewenangan dan tanggung jawab yang dibebankan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi. Pertama, desentralisasi politis. Desentralisasi politis menyangkut segala kebijakan yang dibutuhkan untuk melaksanakan wewenang tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya.

⁷ Malik, Fadjar , *Holistik Pemikiran Pendidikan*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005, hal. 28

Kedua, desentralisasi administratif. Desentralisasi administratif menyangkut strategi pengelolaan kewenangan bersifat implementatif untuk melaksanakan suatu fungsi pendidikan.⁸

Kebijakan ini akan berdampak langsung pada pengelolaan pendidikan di daerah, baik berdampak pada perubahan kebijakan maupun persoalan anggaran. Secara nasional kebijakan tersebut akan mempengaruhi perubahan kebijakan politik nasional, baik secara institusional (kelembagaan) maupun secara managerial. Kebijakan secara institusional dimaksud adalah perubahan kebijakan yang semula dikendalikan pemerintah pusat (sentralistik) yakni UU No.2/1989 yang diturunkan dalam aturan PP No. 27, 28, 29 tahun 1990, menjadi kebijakan yang dikendalikan Pemerintah Daerah (Desentralistik) (UU No.22/1999).

Melalui Undang-Undang tersebut, pendidikan diharapkan berorientasi kepada mutu, relevan dengan kondisi global dan kebutuhan daerah, dan merata pada masyarakat setempat. Untuk menghantarkan agenda besar dari Undang Undang tersebut, maka pemerintah menerapkan MBS yang merupakan pilar pendukungnya adalah Dewan Pendidikan (DP) dan Komite Sekolah/Madrasah (KS/M) sebagai kebijakan nasional.

Kebijakan demi kebijakan bergulir, pada manajemen pengelolaan dan proses belajar mengajar ditandai dengan konsep Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), *link and match*, dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dan pada konsep partisipasi masyarakat terhadap sekolah, ditandai dengan Persatuan

⁸ Komisi Nasional Pendidikan, *Menuju Pendidikan Bermutu dan Merata*, Jakarta: Laporan Komisi Nasional Pendidikan, 2001, hal. 31

Orang Tua Guru dan Murid (POMG), Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BPPP), Majelis Madrasah (MM), dan Komite Sekolah/Madrasah (KS/M).

MI Miftahul Huda Jati Karang Trenggalek merupakan salah satu sekolah dasar swasta berciri khas islam di desa Jati. Dari tahun ke tahun sekolah ini mampu meningkatkan mutunya. Keberhasilan ini tentu saja tergantung dari keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang merupakan keterpaduan dari komponen pendidikan baik yang merupakan masukan instrumental, yaitu kurikulum, tenaga, sarana dan prasarana, sistem pengelolaan maupun masukan yang berkenaan dengan faktor lingkungan. Dan salah satu faktor lingkungan yang dapat menentukan keberhasilan sekolah adalah adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian bagaimanakah partisipasi masyarakat di MI Miftahul Huda dalam pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikannya sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang berkualitas tinggi. Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis partisipasi masyarakat di sekolah tersebut dengan cara mengkaji bentuk partisipasi masyarakat, upaya yang dilakukan badan partisipasi masyarakat untuk mendukung MBS dan Pola kerja partisipasi masyarakat di MI Miftahul Huda Jati Karang Trenggalek.

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan terhadap fenomena penelitian di atas, selanjutnya peneliti merumuskan tiga permasalahan sebagai berikut:

1. Apa bentuk lembaga partisipasi masyarakat di MI Miftahul Huda?
2. Bagaimana upaya lembaga partisipasi masyarakat dalam mendorong masyarakat berpartisipasi terhadap MI Miftahul Huda?
3. Bagaimana pola kerja lembaga partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Miftahul Huda?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini secara umum berusaha untuk mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan pada MI Miftahul Huda Jati Karang Trenggalek tahun pelajaran 2010-2011 dan secara khusus penelitian ini berusaha untuk menjawab tiga masalah yang telah dirumuskan tersebut di atas, yaitu: memberikan gambaran yang sistematis mengenai:

1. Bentuk lembaga partisipasi masyarakat di MI Miftahul Huda
2. Upaya yang dilakukan lembaga partisipasi masyarakat untuk mendorong masyarakat berpartisipasi terhadap MI Miftahul Huda
3. Pola kerja lembaga partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan di MI Miftahul Huda

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Sebagai bahan untuk dijadikan masukan kepada pihak-pihak terkait sebagai penentu kebijakan mengenai kondisi nyata di lapangan tentang bentuk partisipasi masyarakat terhadap madrasah.

2. Sebagai upaya menyadarkan masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat terhadap madrasah.
3. Sebagai pola kerja lembaga partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu madrasah.
4. Dapat menjadikan bahan masukan dan menambah wawasan keilmuan khususnya pada disiplin peneliti yaitu bidang pendidikan islam.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa tulisan baik berupa makalah, diskursus, artikel maupun jurnal ilmiah yang mencoba menampilkan pandangan tentang topik tentang MBS yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah ada diantaranya studi tentang MBS yang difokuskan pada langkah-langkah sekolah dalam menyusun program kerja MPMBS, rencana anggaran, cara sekolah mengimplementasikan program kerja MBS ketercapaian dan terlaksananya program MPMBS, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan MBS. Semua itu mendorong pada sekolah untuk mengambil keputusan secara partisipatif yang melibatkan semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah dan karyawan) serta orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan nasional⁹.

Buku berjudul *Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah: Pelajaran dari Lapangan untuk Mewujudkan Visi Direktorat Pembinaan SMP*, yang diterbitkan UM Press, 2007, oleh Tim Peneliti Faisal (*et.al*). Beberapa hasil

⁹ Kayudi, "Implementasi MPMBS di SMU Negeri 22, Surabaya ,2003

diterbitkan UM Press, 2007, oleh Tim Peneliti Faisal (*et.al*). Beberapa hasil temuan, diantaranya adalah:

1. KS/M di seluruh satuan pendidikan dan daerah belum berfungsi sesuai dengan harapan, tetapi keberadaannya menunjukkan kecenderungan yang baik dan cukup menjanjikan sebagai saluran sekaligus kekuatan pendorong partisipasi masyarakat terhadap sekolah.
2. Ada isyarat bahwa ide-ide dasar partisipasi terhadap sekolah belum dipahami dengan baik dan utuh baik oleh pejabat-pejabat Pemerintah Daerah maupun oleh anggota DP, pengurus KS/M, dan juga kepala sekolah.¹⁰
3. KS/M pada sekolah negeri lebih aktif dan berfungsi relatif baik, sementara pada sekolah-sekolah swasta masih berhadapan dengan masalah internal sekolah dan belum berbagi peran dengan yayasan pemilik sekolah. Meskipun sebagian kasus KS/M di sekolah-sekolah swasta dapat menjalankan fungsi dan memainkan peran dengan cukup baik¹¹

Tesis yang ditulis Sugiharto, mahasiswa MSI-UII dengan judul " penerapan MPMB di SMU Negeri 1 Balapulang Tegal, ditulis pada tahun 2003" yang menekankan bahwa terdapat perbedaan prestasi akademik siswa antara sebelum dan sesudah penerapan MPMB tersebut¹².

¹⁰Faisal, Sanapiah *et.al.*, *Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah: Pelajaran dari Lapangan untuk Mewujudkan Visi Direktobinaan SMP*, UM Press, Malang, 2007, hal xxii

¹¹ *Ibid.*, hal 348

¹² Sugiharto, "Penerapan MPMB di SMU Negeri 1 Balapulang Tegal" Yogyakarta, MSI-UII, 2003

Sedangkan dalam kajian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian tersebut diatas, namun lebih menitik beratkan pada aspek implementasi MBS, yaitu menganalisis partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan.

F. Kerangka Teori

Lahirnya UU No.22 tahun 1999 dan UU no. 25 tahun 2000 membawa pengaruh yang sangat berarti bagi dunia pendidikan di tanah air, karena dalam kurun relative lama pendidikan kita dicengkeram oleh system yang begitu kaku dan sangat sentralistik, sehingga kualitas pendidikan tidak terlalu baik, jika dibandingkan negara-negara setingkat Indonesia. Bagaimanapun juga undang-undang tersebut dibuat dalam rangka memberikan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, semua itu di maksudkan untuk menghadapi tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional.

Bertolak dari pemikiran itu, maka lahirlah inovasi baru dalam bidang pendidikan dengan pertimbangan-pertimbangan kontekstual daerah dimana pengelolaan sekolah berbasis kemandirian. Model itu disebut Manajemen Berbasis Sekolah yang diasumsikan sebagai alternative dalam meningkatkan mutu pendidikan, yang memberikan harapan baru terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan melalui system desentralistik , SDM dan non SDM yang ada disekolah dan luar sekolah diberdayakan. Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama keluarga, masyarakat dan pemerintah.

MBS yang didefinisikan sebagai : ” *School based management refers to form of education administration in which the school become the primary unit for decision making it differ from more tradisional administrasion in which central beuraucracy dominate in the decision making process.* (Managemen Berbasis Sekolah adalah merujuk pada suatu bentuk administrasi pendidikan , dimana sekolah menjadi unit kecil utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini berbeda dengan bentuk tradisional administrasi pendidikan, yakni MBS adalah suatu bentuk administrasi pendidikan, dimana sekolah menjadi unit kecil utama dalam pengambilan keputusan)¹³. Ini merupakan suatu gambaran bentuk administrasi unit kecil utama dalam penyelenggaraan sekolah, yang menurut suatu pemecahan masalah dalam mlingkupm sekolah yang berupa hak dan wewenang sekolah untuk mengatur, mengurus, menentukan dan memutuskan sendiri dalam bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah didaerah masing-masing.

Dengan lahirnya model pengelola pendidikan, yakni manajemen berbasis sekolah ini, mempunyai implikasi terhadap system yang selama ini berjalan tentang pendidikan yang melibatkan masyarakat atau orang tua, yaitu dengan dibentuknya komite sekolah.

Dalam UU no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dikemukakan Komite sekolah / Madrasah adalah badan mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat, dan berfungsi memberikan pertimbangan tentang manajemen madrasah, dan bahwa Komite

¹³Arif Nurawi, *Aplikasi manajemen berbasis Sekolah (MBS) pada Madrasah* “ Ikhlas Beramal (Mei, 2002), hal. 33

pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsure masyarakat dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan.

Namun betapa bagusnya suatu program atau konsep yang dijalankan oleh manajerial tidak akan berjalan mulus manakala tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Untuk itulah pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah secara inklusif Komite sekolah terkait didalamnya adalah orang tua siswa dan masyarakat.

Sesuai dengan amanah UU ada empat bentuk partisipasi masyarakat yang tergabung dalam DP dan KS/M, yaitu :

1. Partisipasi dalam memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Partisipasi dalam bentuk memberikan dukungan (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Partisipasi dalam bentuk memberikan pengontrolan (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan haluan pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Dirjen Dikdasmen, Jakarta, 2002, hal. 33

Penelitian ini adalah penelitian empiris (lapangan) maka data primernya dari lapangan, kemudian bahan kepustakaan sebagian data sekunder digunakan sebagai bahan perbandingan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif.

a. Lokasi penelitian

Penelitian tentang Partisipasi Masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan (Studi analisis terhadap implementasi Manajemen Berbasis sekolah di MI Miftahul Huda) dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Jati Karang Trenggalek, yang sekaligus sebagai samplangnya.

b. Subyek Penelitian

Sebelum peneliti mengemukakan bagaimana peneliti menentukan subjek penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan mengupas secara sederhana tentang istilah Populasi dan Sampel yang umum dipergunakan untuk menyebut subjek dalam sebuah penelitian.

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian (semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian. Oleh karenanya, apabila seorang peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian

populasi. Studi atau penelitiannya disebut dengan studi populasi atau studi sensus.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas, maka populasi yang kami maksud dalam penelitian ini adalah 212 orang wali murid dan 30 anggota kemite sekolah di MI Miftahul Huda Jati Karanganyar yang jika diakumulasikan berjumlah 242 orang.

2) Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan mewakili keseluruhan populasi tersebut. Oleh karenanya peneliti yang hanya meneliti sebagian saja dari populasi untuk pada akhirnya digunakan untuk menggeneralisir seluruh populasi, dinamakan penelitian sampel.¹⁶

Pengambilan sampel ini bisa dilakukan ketika populasi dirasa terlalu banyak dan tidak memungkinkan efektifnya sebuah penelitian. Jelasnya, ketika jumlah populasi di bawah 100 maka semua populasi harus diteliti, akan tetapi jika melebihi 100 maka peneliti dibolehkan hanya meneliti sampel yang besarnya antara 10 -15 % atau 20-25% atau bahkan lebih besar, tergantung kepada: a) Kemampuan peneliti dari segi dana, waktu dan tenaga; b) Sempit luasnya wilayah

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal. 108

¹⁶ *Ibid*, hal. 109

pengamatan dari setiap subjek; c) Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti.¹⁷

Dari pengertian-pengertian tentang populasi dan sampel di atas, peneliti kemudian mengambil sample dari keseluruhan populasi sebanyak 48 orang (20%) dengan menggunakan metode *stratified proporsional random sampling*. Peneliti mengambil sampel masing-masing 20% dari kelompok populasi yang sebelumnya telah peneliti kelompokkan sesuai dengan jenis populasi.

2. Metode Pendekatan

Penulis dalam melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat terhadap peningkatan mutu madrasah khususnya di MI Miftahul Huda Jati Karangn Trenggalek ini, menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian diskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidik.¹⁸ Yang menarik dalam penelitian deskriptif adalah ia bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku , yang didalam melakukan penelitian berupa mendiskripsikan, mencatat, analisis, dan

¹⁷ *Ibid*, hal. 112

¹⁸ Moh. Nazir, *metode Penelitian* , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal. 6

menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.¹⁹ Sedangkan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu.²⁰

Penelitian ini adalah studi analisis terhadap implementasi MBS di MI Miftahul Huda. Untuk keperluan menjangkau data kualitatif, penelitian ini sampelnya dipilih sesuai dengan kebutuhan (*purposive sampling*).²¹ Sampel yang ingin didapat dalam meneliti sifatnya adalah group nominal yaitu berupa beberapa pertanyaan yang akan diajukan dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan, sementara untuk pendekatannya lebih ditekankan pada implementasi MBSnya.

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan sekunder. Yang dimaksud dengan data primer adalah data tentang partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Miftahul Huda, yang meliputi : bentuk partisipasi masyarakat, upaya pendorong partisipasi masyarakat dan pola kerja partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Adapun data sekunder adalah data pendukung tentang implementasi MBS di

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hal. 26

²⁰ Lexi J. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 9

²¹ S. Nasution, *“Metode Research”*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hal. 27

madrasah, yang berupa buku-buku, modul-modul, materi-materi pembelajaran dengan model MBS

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah ada dua macam, sumber data primer dan sumber data sekunder, Sumber data primer dalah kepala sekolah, guru, komite madrasah dan orang tua siswa sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku, catatan-catatan dan materi-materim pelatihan tentang MBS.

3. Metode Pengumpulan data

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan, peneliti telah melakukan penelitian kancang dilokasi penelitian yang telah ditetapkan. Untuk pengumpulan semua data diperlukan teknik pengumpulan data, yaitu : Observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan fenomenologis dan merupakan jenis studi deskriptif eksploratif. Dan untuk mendapatkan data diinginkan, digunakan teknik sebagai berikut :

- a. Metode observasi, bertujuan untuk mengetahui dan mengamati,²² secara langsung kondisi umum MI Miftahul Huda Jati Karang Trenggalek
- b. Metode wawancara/interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.²³ Dalam hal ini wawancara langsung kepada kepala sekolah, komite madrasah, dan

²² Nazir, " *Metode .*, hal. 212

²³ Nasution , *Metode Research*, hal. 113

orang tua siswa berkaitan dengan partisipasi masyarakat terhadap madrasah.

- c. Metode angket adalah daftar pertanyaan yang didistribusikan kepada responden dibawah pengawasan langsung dari peneliti.²⁴ Hal ini dilakukan untuk menjangring beberapa pendapat dan informasi tentang partisipasi masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan di MI Miftahul Huda Jati karangan Trenggalek.
- d. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dapat mendukung kesempurnaan studi yang sudah terkumpul sebelumnya.²⁵ Dokumentasi ini berupa data-data, buku-buku, dan modul-modul pembelajaran yang berkaitan dengan implementasi MBS di MI Miftahul Huda Jati Karangan Trenggalek.

4. Metode Analisa Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, langkah selanjutnya adalah dianalisa. Teknik analisa yang digunakan, akan tergantung pada pokok permasalahan dan jenis data yang berhasil dikumpulkan. Data yang terkumpul dari hasil penelitian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu setelah data terkumpul lalu disusun dan dikelompokkan dengan menggunakan pembahasan sedemikian rupa untuk menggambarkan obyek penelitian, sehingga dapat menggambarkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dan untuk pendalaman data memakai teknik analisis deskriptif.

²⁴ *Ibid.*, hal. 128

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, hal. 243

jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dan untuk pendalaman data memakai teknik analisis deskriptif.

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif eksploratif. Deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu madrasah, sedangkan eksploratif dimaksudkan untuk memperoleh data tentang implementasi MBS di MI Miftahul Huda Jati Karanganyar Trenggalek.

H. Sistematika Pembahasan

Keseluruhan bagian dalam tulisan ini disusun dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- Bab I** :Adalah pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang menjelaskan tentang hakikat pendidikan beserta tugas ataupun tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap terlaksananya penyelenggaraan pendidikan di negeri ini. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti membuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan
- Bab II** :Adalah kajian pustaka. Pada bagian ini peneliti memaparkan tentang bentuk lembaga partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Bentuk partisipasi masyarakat bisa berupa tenaga, berupa pemikiran dan berupa finansial. Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan (seperti SPP, amal jum'at, iuran registrasi,

pada bagian ini peneliti juga membahas tinjauan teoritis tentang pengertian partisipasi dan masyarakat, Studi Teoritik Konsep partisipasi Masyarakat, Partisipasi Masyarakat dalam pendidikan, Partisipasi masyarakat Terhadap Sekolah Berbasis Agama , Partisipasi masyarakat dalam konsep MBS dan Pola kerja lembaga partisipasi masyarakat.

Bab III :Gambaran umum wilayah penelitian, meliputi sejarah perkembangan, keadaan guru dan siswa serta program dan fasilitas pendidikan.

BAB IV :Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini peneliti menampilkan, bentuk lembaga partisipasi masyarakat, upaya pendukung partisipasi masyarakat, dan pola kerja lembaga partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu madrasah.

BAB V :Kesimpulan, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MBS

A. Partisipasi Masyarakat

Dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang definisi partisipasi masyarakat, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pendidikan, partisipasi masyarakat terhadap sekolah berbasis agama, partisipasi masyarakat dalam konsep MBS dan pola kerja partisipasi masyarakat.

1. Pengertian Partisipasi

Pengertian tentang partisipasi secara formal adalah turut sertanya seseorang, baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan mengenai persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukannya.²⁶

Lebih jauh dijelaskan oleh Keith Davis dalam Sastropetro²⁷ bahwa partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Dengan kata lain, batasan dari partisipasi adalah keterlibatan komunitas

²⁶H.A.R. Tilar Talizuduhu, *Manajemen Pendidikan Nasional Kajian Masa Depan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 103

²⁷Santoso Sastropetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni, 1988, hal. 13

setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan.²⁷

Selanjutnya Korten dalam Khadiyanto²⁸ mendefinisikan partisipasi sebagai suatu tindakan yang mendasar untuk bekerjasama yang memerlukan waktu dan usaha, agar menjadi mantap dan hanya berhasil baik dan terus maju apabila ada kepercayaan. Dengan kata lain,²⁹ Poerbakawatja memberikan batasan partisipasi sebagai suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan suatu pelaksanaan dari gejala sesuatu yang berpusat pada kepentingannya dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.

Lain halnya dengan definisi partisipasi menurut Suherlan dalam Khadiyanto.³⁰ Menurutnya, partisipasi diartikan sebagai dana yang dapat disediakan atau dapat dihemat sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat pada proyek-proyek pemerintah. Selain itu, partisipasi juga dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah serta keterlibatan masyarakat dalam memikul dan memetik hasil atau manfaat pembangunan.

²⁷ *Ibid.*, hal. 33

²⁸ Parfi Khadiyanto, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2007, hal. 28-29

²⁹ Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta. Penerbit: Gunung Agung, 1981, hal. 209

³⁰ Parfi Khadiyanto, *Partisipas.*, hal. 29

Dari beberapa pengertian tentang partisipasi di atas, Khadiyanto³¹ merumuskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan/pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mampu untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan hingga pelaksanaan program.

2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat tertentu yang menunjukkan adanya pemilikan norma-norma hidup bersama walaupun di dalamnya terdapat berbagai lapisan antara lain lingkungan sosial.³² Selain itu, menurut A.W.Wijaya,³³ masyarakat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang mempunyai identifikasi sendiri yang membedakan dengan kelompok lain dan hidup di dalam wilayah atau daerah tertentu secara tersendiri. Kelompok ini, baik sempit maupun luas mempunyai perasaan akan adanya persatuan di antara kelompok itu. Sekelompok orang dapat dikatakan masyarakat apabila di dalamnya terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain.

Selain itu, definisi masyarakat dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 dijabarkan sebagai kelompok Warga Negara Indonesia

³¹ *Ibid.*, hal. 31

³² Y.B. Suparlan, *Kamus Istilah Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: Kanisius, 1990, hal. 85

³³ A.W. Wijaya, *Manusia Indonesia Individu, Keluarga dan Masyarakat*. Palembang: Presindo. 1985, hal. 34

nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Adapun istilah masyarakat menurut Purwanto³⁴ merupakan konsep yang mengacu kepada semua individu, kelompok, lembaga atau organisasi yang berada di luar sekolah sebagai lembaga pendidikan.

3. Studi Teoritik Konsep Partisipasi Masyarakat

Ide meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap madrasah merupakan kebijakan nasional pendidikan di Indonesia.³⁵ Kebijakan pembentukan Komite Sekolah di satuan pendidikan dan Dewan Pendidikan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, merupakan wujud nyata upaya konkrit pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap sekolah. KS/M dan DP diharapkan berfungsi sebagai wadah untuk menggalang peran serta masyarakat terhadap sekolah. Kehadirannya diharapkan berfungsi secara optimal selaku badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator bagi upaya perbaikan dan kemajuan sekolah.³⁶

Konsep awal kebijakan ini ditandai dengan penerapan kebijakan desentralisasi atau otonomisasi pendidikan secara nasional, diwujudkan pelaksanaannya melalui penerapan kebijakan MBS di sekolah. MBS menurut Suryadi merupakan paradigma baru pengelolaan pendidikan yang bertujuan mengembalikan sekolah kepada pemilik atau *stakeholders* asli,

³⁴Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1987, hal. 188

³⁵Undang-Undang Republik Indonesia, No. 25 Tahun 2000 tentang *Program Pembangunan Nasional (Propenas)*, Bandung: Citra Umbara

³⁶ Keputusan Menteri No. 044/U/2002 tentang *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*

yaitu masyarakat.³⁷Sementara Nanang Fatah³⁸ menyebutkan bahwa, MBS adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. MBS mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat lokal (*local stakeholder*). Dalam pelaksanaan perlu diterapkan fungsi manajemen dengan baik mulai dari perencanaan, pengawasan, dan pembinaannya. Komponen sekolah yang dikelola dengan baik dalam MBS adalah kurikulum, program pengajaran, kesiswaan, keuangan/TU (administrasi), tenaga pendidik, sarana-prasarana, dan partisipasi masyarakat (Komite Sekolah).³⁹

Secara teoritik, tampaknya tidak mudah mendorong dan menggalang masyarakat untuk berpartisipasi secara luas terhadap sekolah. Karena konsep partisipasi secara substantif adalah keterlibatan atau peran serta masyarakat secara sukarela, baik pemikiran ataupun materi serta tenaga yang mereka miliki untuk memajukan sekolah. Hingga pada tahap puncaknya adalah masyarakat memahami dan menyadari bahwa lembaga

³⁷ Sanapiah, Faisal et.al., *Partisipasi*, hal. 4

³⁸ Nanang, Fatah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hal. 5

³⁹ Benny, Susetyo, *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: LKiS, 2005. hal. 36

sekolah adalah milik bersama masyarakat dan menjadi simbol kemajuan bersama. Hal ini menurut Harper (1986) dan Baldrige (1975), seperti dikutip oleh Faisal *et.al*⁴⁰, bahwa partisipasi atau pendukungnya senantiasa bersifat sukarela, mereka bergabung atas dasar pilihan atau ketetapan hati yang sifatnya sukarela.

Menurut Lane dan Corman (1997), konsep partisipasi tidak hanya "*passive relationship*" tapi "*active relationship*", artinya bahwa jaringan hubungan tidak sekedar berpola guru-murid, orang tua anak, atasan-bawahan, sekolah-orang tua murid dan semacamnya, sebagaimana pada umumnya yang berlaku di masyarakat, tetapi jaringannya bisa lintas peran dan institusi agar berbagai komponen dalam masyarakat bisa "duduk bersama", saling berhubungan, berkomunikasi secara komunikatif, mendengar, memberi dan menerima, saling memahami dan berbagi sehingga tercipta ikatan masyarakat yang semakin kuat solidaritasnya, mereka berkembang menjadi semakin saling mempercayai dan menunjang. Dengan begitu, rasa kepemilikan (*ownership*) dan tanggung jawab masyarakat terhadap sekolah akan berkembang, membudaya, dan berkelanjutan.

Apakah mungkin muncul begitu saja, masyarakat secara suntu merta berpartisipasi terhadap sekolah? Tampaknya mustahil pelebagaan partisipasi masyarakat dalam bentuk Komite Sekolah secara otomatis memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat luas untuk berpartisipasi

⁴⁰ Sanapiah Faisal et.al., *Partisipasi*, hal. 10

terhadap sekolah. Sebagaimana hasil temuan Faisal *et.all.* dan tim peneliti ICW, menunjukkan bahwa pelembagaan partisipasi masyarakat dalam bentuk KS/M justru menimbulkan konflik baru. Keberadaan KS/M pun dianggap mengurangi substansi makna otonomi sekolah yang diwujudkan dalam konsep MBS itu sendiri. Pemerintah tampaknya sedang panik dalam mengelola pendidikan. Jika implementasi komite hanya sampai pada menggalang dana orang tua siswa sebagaimana temuan terdahulu, maka pelembagaan partisipasi masyarakat dalam bentuk komite tidak perlu ada. Toh sekolah dari tahun ketahun, terutama sekolah swasta telah menunjukkan partisipasi yang tinggi terhadap sekolah.

Lalu, bagaimana caranya untuk menyadarkan masyarakat luas agar dapat memahami tentang pentingnya peran swasta (masyarakat) dalam pengelolaan sekolah? Dan harus dimulai dari mana? Serta apa langkah-langkah dan atau strategi yang harus ditempuh untuk mendapatkan para partisipan mau atau bergabung dalam suatu gerakan sosial dalam hal ini berpartisipasi terhadap sekolah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus segera dijawab untuk menyelesaikan kompleksitas persoalan dalam pengelolaan pendidikan di tanah air.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sebagaimana pada rumusan masalah, maka penelitian ini difokuskan untuk menjawabnya dengan menggunakan beberapa teori yang ada. Diantara teori-teori tersebut yang digunakan adalah:

Pertama, karena berpartisipasi terhadap sekolah yang digalang pemerintah adalah kerja sosial, maka salah satu teori yang digunakan untuk menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi terhadap sekolah adalah menggunakan teori gerakan sosial. Menurut Ismail (2006) seperti yang dikutip oleh Faisal⁴¹ bahwa para partisipan mau bergabung dalam suatu gerakan sosial tidak terlepas dari keinsyafan dan kesetujuan para partisipan itu sendiri terhadap faham beserta cita-cita yang dituju oleh gerakan sosial tempat mereka (para partisipan) itu bergabung. Mereka menyetujui, menerima, dan merasa mantap dengan cita-cita gerakan sosial dimaksud. Itulah yang membuat mereka berketetapan hati (rela) untuk bergabung dan terlibat memperjuangkan faham beserta cita-cita yang diusung oleh gerakan sosial bersangkutan. Dengan kata lain, kesukarelaan para partisipan untuk bergabung dalam suatu gerakan sosial apa pun menandakan adanya penerimaan dan keinsyafan mereka terhadap cita-cita yang diperjuangkan yang hendak dicapai melalui gerakan tersebut. Dan mereka memang sepakat pada filosofi dan ideologi yang ditawarkan (untuk diperjuangkan) oleh gerakan sosial tempatnya bergabung tersebut. Konsep ini oleh Herbert Blumer, seperti dikutip oleh Arifin⁴² menyebutnya dengan faktor idiologis. Jika suatu gerakan sosial tidak ditopang oleh ideologi, maka akan menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan. Oleh karena itu, menurut Blumer, gerakan sosial yang

⁴¹ *Ibid.*, hal. 8

⁴² Imron, Arifin, *Rancangan Studi Kasus Tunggal, Multi Situs dan Multi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif*, Makalah Penelitian Kualitatif bagi Dosen PTAI se-Kopertais Wilayah IV, Malang Unisma, 2000, hal 388

dirancang oleh suatu kelompok perlu merumuskan kerangka ideologinya yang berisi lima hal penting, yaitu: pernyataan tujuan gerakan; kritik terhadap struktur; doktrin sebagai justifikasi tujuan gerakan; seperangkat kepercayaan dan; mitos gerakan.

Kedua, karena yang digerakkan untuk berpartisipasi terhadap sekolah adalah masyarakat pedesaan, dan salah satu ciri masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang kurang sadar tentang pentingnya dunia pendidikan, masyarakat yang mau bergabung terhadap suatu organisasi sosial karena organisasi sosial tersebut memenuhi kebutuhan dirinya, dan masyarakat yang sudah lebih maju (masyarakat modern), maka salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori motivasi. Salah satu teori motivasi yang digunakan dalam penelitian adalah teorinya David McClelland. Menurut McClelland, seperti yang dikutip oleh Armstrong⁴³ dan Mulyasa⁴⁴ menyebutkan bahwa kebutuhan yang menjadi motivasi setiap orang adalah ada tiga kebutuhan yaitu: (a) kebutuhan untuk berprestasi: yang disebut sebagai kebutuhan untuk berhasil bersaing; (b) kebutuhan untuk berafiliasi: yang disebut sebagai kebutuhan berhubungan yang hangat dan bersahabat dengan orang-orang lain; dan (c) kebutuhan untuk berkuasa: yang disebut sebagai kebutuhan untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Bahwa setiap individu bergabung terhadap suatu organisasi sosial tertentu, akan terdorong atau termotivasi oleh tiga

⁴³ Michel, Armstrong *Seri Pedoman Manajemen: Manajemen Sumber Daya Manusia*, Alih Bahasa: Cikmat et.al., Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1990, hal. 73

⁴⁴ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cetakan ke Sepuluh, 2006, hal. 123

faktor ini, yaitu untuk mendapatkan prestasi. Prestasi yang dimaksudkan dalam konteks ini penghargaan. Karena setiap individu ingin dihargai oleh suatu komunitas dalam lingkungannya. Kemudian setiap individu juga terdorong oleh keinginan untuk bergabung (berafiliasi) dengan masyarakat lain karena faktor persahabatan, kekerabatan, kesukuan, atau bentuk-bentuk promordial lainnya. Kemudian juga setiap individu terdorong oleh kebutuhan ingin berkuasa. Karena kepentingan politik kekuasaan inilah banyak orang kemudian ingin bergabung pada organisasi sosial, terutama para politisi kepartaian. Mereka ingin dikenal, karena itu mereka harus bergabung dengan organisasi sosial kemasyarakatan apa pun.

Ketiga, karena untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi terhadap sekolah berbasis agama, dalam hal ini sekolah Islam, maka dalam penelitian ini juga, akan menggunakan konsep-konsep Islam untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi terhadap sekolah. Peran agama begitu *determinant* (menentukan) dan terbukti efektif untuk mendorong setiap individu berpartisipasi terhadap sekolah. Karena dalam ajaran agama, terdapat konsep tentang *fastabiqul khairat* (berlomba-lomba dalam kebajikan); Firman Allah SWT :

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اِيَّاتُ بِكُمْ اَللّٰهُ جَمِيعًا
 اِنَّ اَللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٤٦﴾

”Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu

sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”⁴⁵

ta'āwun (tolong menolong); Firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

”dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”⁴⁶

bekerja *ikhlas* (tanpa pamrih), watawā shaṭibishshobri watawā shaṭibil marhamah (berpesan untuk bersabar dan kasih sayang); Firman Allah SWT :

لَمَّا كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿٧٧﴾

”Dan dia (Tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.”⁴⁷

Berjama'ah (berorganisasi) dan bentuk-bentuk lainnya. Dan memang fakta menunjukkan demikian, bahwa banyak orang berafiliasi (bergabung) dengan suatu organisasi sosial didorong oleh prinsip-prinsip ajaran agama tersebut. Jika prinsip ini diterapkan pada suatu sekolah, maka pada sekolah tersebut akan terdapat konsep partisipasi masyarakat yang hakiki, oleh Lane dan Corman (1997), disebut dengan konsep "*active relationship*". Sementara oleh Nelson menyebutnya dengan partisipasi demokrasi (*democratic participation*) yang menonjolkan kekuasaan warga (*citizenship*) (The British Council, 2001).

⁴⁵ QS. Al-Baqoroh (2):148

⁴⁶ QS. Al-Maidah (5):2

⁴⁷ QS. Al-Balad (90):17

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 20 tahun 2003, memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Adapun kewajibannya adalah memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Lebih lanjut partisipasi masyarakat dalam pendidikan bisa meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Keikutsertaan masyarakat ini dapat diwujudkan dalam bentuk Komite Sekolah atau Dewan Pendidikan.

Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.⁴⁸ Adapun Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan

⁴⁸Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara, 2006, hal. xli

dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.⁴⁹ Dengan kata lain, komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.⁵⁰

Adapun tujuan dari Komite Sekolah adalah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Sekolah berperan sebagai:

(a) *Advisory agency* atau pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; (b) *Supporting agency* atau pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (c) *Controlling agency* atau pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (d)

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Keputusan Menteri No. 044/U/2002 tentang *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*

Mediator atau perantara antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Berdasarkan petunjuk Direktur Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (MAPENDA) Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, bahwa struktur organisasi KS/M⁵¹ adalah sebagai berikut:

Pertama, keanggotaan. Keanggotaan KS/M berasal dari unsur yang ada dalam masyarakat, yang terdiri dari: (1) unsur masyarakat yang berasal dari: orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, DUDI, organisasi profesi tenaga kependidikan, wakil alumni dan wakil peserta didik untuk Madrasah Aliyah; (2) unsur Guru paling banyak 15% dari jumlah anggota KS/M; (3) unsur yayasan; (4) Badan Perwakilan Desa atau lainnya yang dianggap perlu dapat pula diikuti; (5) Perwakilan siswa bagi Madrasah Aliyah; dan (6) jumlah anggota KS/M disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah asal.

Kedua, kepengurusan. Kepengurusan KS/M ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus Komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua, dianjurkan bukan dari kepala sekolah menangani urusan administrasi dan bukan Pengawas Madrasah.

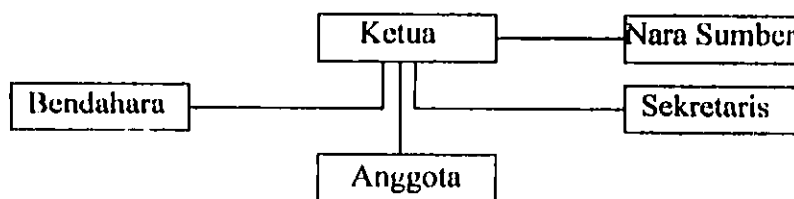
⁵¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Komite Sekolah*, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2003, hal. 16-18

Pengurus KS/M ditetapkan berdasarkan kriteria berikut: (1) dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka; (2) masa kerja ditetapkan oleh anggota KS/M; (3) jika diperlukan, dibantu team ahli.

Mekanisme kerja pengurus KS/M dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) pengurus KS/M terpilih bertanggung jawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai dengan AD/ART; (2) pengurus KS/M menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidik peserta didik; (3) apabila pengurus KS/M terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru; dan (4) pembiayaan Pengurus KS/M diambil dari anggaran KS/M yang ditetapkan secara musyawarah.

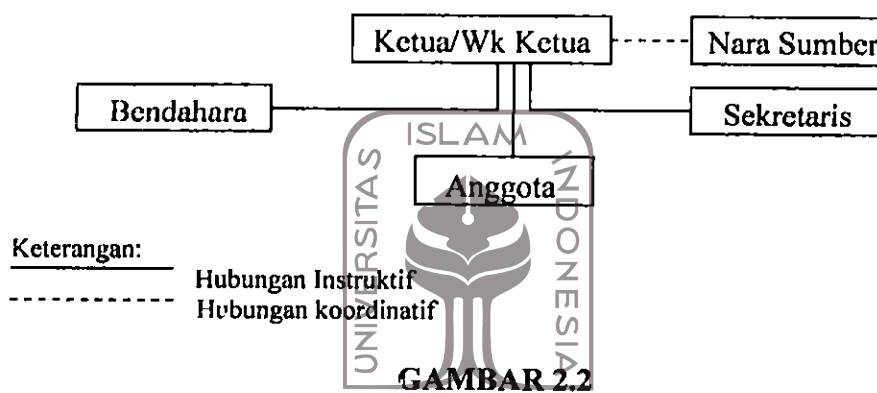
Katiga, AD dan ART. KS/M wajib memiliki AD dan ART. AD sekurang-kurangnya memuat: (1) Nama, tempat, dan kedudukan; (2) Dasar, tujuan, dan kegiatan; (3) Keanggotaan dan kepengurusan; (4) Hak dan kewajiban; (5) Keuangan; (6) Mekanisme kerja dan rapat-rapat; dan (7) Perubahan AD/ART dan Pembubaran Organisasi. Dan ART sekurang-kurangnya memuat: (1) Mekanisme pemilihan, penetapan anggota, dan pengurus KS/M; (2) Rincian tugas KS/M; (3) Mekanisme rapat; (4) Kerja sama dengan pihak lain; dan (5) Penutup.

Gambar berikut menampilkan hubungan Komite Sekolah dalam struktur organisasi Komite Sekolah/Madrasah.



GAMBAR 2.1

STRUKTUR ORGANISASI KS/M UNTUK SATU SEKOLAH



GAMBAR 2.2

STRUKTUR ORGANISASI KS/M UNTUK BEBERAPA SEKOLAH

5. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pada subbab terdahulu telah diuraikan bahwa pelibatan masyarakat dalam pendidikan adalah dengan memberikan dukungan sumber daya yang ada. Hal ini berarti bahwa dukungan tersebut bersifat luas karena tidak hanya berupa pendanaan saja. Hal ini mempertegas pendapat Keith Davis dalam Sastropetro Dewan Pendidikan⁵² bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah berupa: (a) konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa; (b) sumbangan spontan berupa uang dan barang; (c) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berada di luar lingkungan tertentu (pihak ketiga); (d) mendirikan

⁵² Santoso, Sastropetro, *Partisipasi*, hal. 16

proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh masyarakat; (e) sumbangan dalam bentuk kerja; (f) aksi massa; (g) mengadakan pembangunan di kalangan keluarga desa mandiri; (h) membangun proyek komunitas yang bersifat otonom.

Selain itu, Konkon dan Suryatna⁵³ memberikan tawaran bahwa partisipasi dapat diwadahi dalam bentuk : (a) buah pikiran, dalam hal ini seperti rapat, diskusi, seminar, pelatihan dan penyuluhan; (b) tenaga, seperti gotong royong; (c) harta benda; (d) keterampilan.

Adapun bentuk partisipasi yang mungkin dari wadah tersebut menurut Konkon adalah sebagai berikut: (a) sumbangan tenaga fisik; (b) sumbangan finansial; (c) sumbangan materi; (d) sumbangan moral (nasihat, petuah, amanat); (e) sumbangan keputusan.

Selanjutnya, Keith Davis dalam Sastropetro⁵⁴ mengemukakan beberapa jenis partisipasi masyarakat. Menurutnya jenis-jenis partisipasi masyarakat meliputi: (a) pikiran; (b) tenaga; (c) pikiran dan tenaga; (d) keahlian; (e) barang dan (f) uang.

6. Partisipasi Masyarakat Terhadap Sekolah Berbasis Agama

Konsep partisipasi masyarakat terhadap sekolah berbasis agama, terutama madrasah, dilihat dari aspek *historis-filosofis*, justru mendapat tempat khusus bagi masyarakat Muslim, dari tahun ke tahun. Konsep partisipasi yang belakangan dikembangkan ini dianggap terlambat.

⁵³ Konkon dan Suryatna, *Sejarah Azas-Azas dan Teori-Teori Pengembangan Sosial*, Bandung: LP3s IKIP Bandung, 1978, hal. 1

⁵⁴ Santoso Sastropetro, *Partisipasi*, hal. 16

Muhaimin, menyebutkan bahwa dalam realitas sejarah, madrasah tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat muslim itu sendiri. Sehingga madrasah sebenarnya sudah menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) dengan partisipasi masyarakat sebagai pilarnya. Indikatornya madrasah sampai saat ini masih tetap eksis, karena landasan filosofis berdirinya didorong oleh spirit agama dalam rangka pengembangan ajaran Islamiyah. Hingga saat ini kurang lebih 90% jumlah madrasah yang masih eksis di Indonesia adalah lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta. Sedangkan sisanya bersatatus negeri.⁵⁵ Dengan demikian partisipasi masyarakat terhadap madrasah lebih besar dari sekolah non madrasah.

Ada pun menurunnya minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam "madrasah" dewasa ini, lebih disebabkan oleh hegemoni politik kekuasaan. Baik hegemoni politik global, regional, nasional, maupun lokal. Hegemoni politik global dan regional dapat ditandai dengan pengambil alihan kekuasaan sebesar-besarnya oleh Barat, dan hegemoni nasional dan lokal dapat ditandai dengan pelarangan aktivitas pendidikan Islam dari Hindia Belanda hingga Orde Baru yang ditandai dengan keluarnya Inpres SDN No.10/1973 tentang pengambil alihan "kepemilikan" sekolah yang sebelumnya milik masyarakat menjadi milik pemerintah. Tantangan-tantangan yang besar ini lah, yang dilidupi madrasah dalam perjalanan sejarahnya.

⁵⁵ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006, hal.

Dampak Inpres membuat lembaga pendidikan Islam menjadi kurang dipercayadiri, karena dianggap sekolah nomor dua. Bersekolah di madrasah karena di sekolah negeri tidak diterima. Dan ini masih terasa hingga saat ini. Sehingga kedepan akan terjadi sebaliknya jika sekolah-sekolah Islam berbenah meningkatkan mutu layanan, mutu proses, dan mutu keluaran.

Berkaitan dengan partisipasi terhadap sekolah berbasis agama, berbagai temuan menunjukkan bahwa, masyarakat lebih tertarik berpartisipasi terhadap sekolah-sekolah berbasis agama dari pada sekolah yang bukan berbasis agama. Pada sekolah berbasis agama ini lebih mudah menggerakkan masyarakat untuk bergabung terhadap sekolah dari pada sekolah umum. Karena sekolah berbasis agama sudah memiliki potensi-potensi besar untuk mendorong masyarakat berpartisipasi terhadap sekolah. Misalnya tokoh-tokoh agama dan ajaran-ajaran agama yang dianut masyarakat itu sendiri.

Temuan Faisal et.al.⁵⁶ yang dilaporkan oleh Margono, di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Anggapan masyarakat umum di Amuntai ini, bahwa masyarakat mau berpartisipasi terhadap sekolah asal untuk kepentingan agama. Masyarakat lebih tertarik membesarkan SMP Assasun Najah berbasis agama dari pada SMP Negeri 7. Pada SMP Assasun Najah ini tidak memungut biaya pendidikan (pendidikan gratis), dan untuk biayanya bersumber pada amal masyarakat

⁵⁶ Sanapiah, Faisal et.al., *Partisipasi*, hal. 112

dipungut melalui malam dana (saprah amal) yang diselenggarakan oleh pengelola pondok. Kasus ini juga sama dialami di Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, seperti dilaporkan oleh Sanapiah Faisal, Hasil temuan menunjukkan bahwa, sekolah umum hampir seluruhnya berbasis negara. Sangat kecil sekolah umum berbasis masyarakat. Sebaliknya, sekolah-sekolah keagamaan hampir seluruhnya berbasis masyarakat, dan kecil sekali berbasis negara.⁵⁷ Penelitian ini dengan mengambil perbandingan antara SMP Muhammadiyah 40 dan SMP Negeri 3. Temuan Faisal menunjukkan bahwa masyarakat meninggalkan SMP Negeri 3 lebih disebabkan oleh kepala sekolah dalam memimpin anak buahnya dan melakukan komunikasi dengan masyarakat. Sementara untuk SMP Muhammadiyah 40 menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi karena berbasis agama dan kesamaan ideologi gerakannya. Dan masyarakat merasa senang sebagai donatur tetap terhadap sekolah Muhammadiyah. Karena dengan dimasukkan sebagai donatur, mereka dapat berinfak.

Untuk mendorong dan menyadarkan masyarakat berpartisipasi terhadap sekolah, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Akan tetapi akan menyita banyak pikiran, banyak tenaga, dan banyak materi. Karena yang digerakkan adalah masyarakat, sementara masyarakat adalah manusia, dan manusia adalah makhluk individu. Setiap individu memiliki karakteristik sifat yang unik, khas, dinamis (berubah-ubah), dan berbeda-beda. Mula hal yang terpenting adalah bagaimana mencari formulasi yang tepat,

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 76

dengan berbagai upaya, strategi, dan langkah-langkah konkrit yang dapat menyentuh hati para partisipan agar mau bergabung dengan lembaga partisipasi masyarakat yang dibentuk. Diantara bentuk-bentuk strategi untuk mendorong dan menyadarkan masyarakat agar berpartisipasi terhadap sekolah adalah pendekatan ideologis, pendekatan motivasi, dan pendekatan sosial keagamaan. Tiga bentuk strategi gerakan ini lah, barangkali akan memberikan terapi yang tepat untuk mendapatkan partisipasi permanen atau rasa kepemilikan (*ownership*) terhadap sekolah dapat terwujud sesuai impian. Tanpa strategi dan langkah-langkah tersebut, konsep partisipasi terhadap sekolah khususnya di Indonesia akan mengalami kebuntuan.

Untuk itu, aspek yang terpenting yang harus diketahui pihak sekolah dan komite adalah aspek kultur dan apa yang menjadi motivasi masyarakat sekitarnya. Setiap aktifitas apapun yang dilakukan manusia sangat tergantung pada aspek motivasinya. Aspek motivasi ini dalam pandangan Islam dikenal dengan istilah "niat". Sebagaimana dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa "*innamal 'amalū binniyat*" (tiap aktifitas tergantung pada niatnya).⁵⁸ Artinya, Islam melihat etos dan motivasi partisipasi masyarakat setiap umatnya cukup dilihat pada bagaimana niat atau motivasi seseorang. Jika niat atau motivasi masyarakat berpartisipasi itu ibadah, maka masyarakat secara sukarela dengan penuh keikhlasan

⁵⁸ Abu Isa Abdullah bin Salam, *Ringkasan Syarah Arba'in An-Nawawi - Syaikh Shalih Alu Syaikh Hafizhohulloh*, dikutip dari <http://muslim.or.id/>, accessed 8 Oktober 2010.

berbondong-bondong berpartisipasi terhadap sekolah. Dengan demikian, sekolah dan komite akan mudah mendapatkan partisipasi masyarakat luas.

Menurut Mulyasa,⁵⁹ bahwa keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang datang dari dalam maupun dari luar. Dari berbagai faktor tersebut, menurut Mulyasa motivasi merupakan suatu faktor yang cukup dominan dan dapat menggerakkan faktor-faktor lain kearah efektivitas kerja. Dalam konteks tertentu motivasi sering disamakan dengan mesin dan kemudi mobil, yang berfungsi sebagai penggerak dan pengarah.

Dari sini dapat dikatakan bahwa, tiga strategi ini, strategi pendekatan ideologis, strategi pendekatan motivasi, dan pendekatan sosial keagamaan memiliki peran strategis dan sangat menentukan untuk mendorong dan membangun kesadaran masyarakat agar berpartisipasi terhadap sekolah. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang efektif, baik dari kepala sekolah sebagai pionernya, maupun dari Komite Sekolah sebagai mitra sekolah. Karena hanya dengan kepemimpinan yang efektif, yang mampu menggerakkan suatu roda organisasi menjadi organisasi modern. Dan masyarakat modern-rasional, hanya mau bergabung dengan komunitas modern yang terbuka dan dinamis.

a. Motivasi Partisipasi Masyarakat

Di sini perlu pembahasan khusus mengenai motivasi, mengingat salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan teori motivasi.

⁵⁹ Mulyasa, *Manajemen*, hal. 119

Istilah motivasi sering digunakan secara bergantian dengan istilah kebutuhan (*need*), keinginan (*want*), dorongan (*drive*), dan gerak hati (*impuls*). Hersey dan Blanchard (1989) menyebutkan istilah tersebut merupakan motif, sedangkan motivasi adalah kekuatan yang mendorong seorang untuk melakukan suatu kegiatan. Motif menurutnya masih bersifat potensial, dan aktualisasinya dinamakan motivasi, serta pada umumnya diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata. Dengan demikian, motivasi adalah keinginan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, atau dorongan.

McClelland (1986) menyebutkan bahwa motivasi adalah unsur penentu yang mempengaruhi perilaku yang terdapat dalam setiap individu. Motivasi adalah daya penggerak aktif, yang terjadi pada saat tertentu, terutama jika kebutuhan untuk mencapai tujuan sempat dirasakan atau mendesak.

Sementara Armstrong⁶⁰ menyebut bahwa "motif" adalah sesuatu yang memulai gerakan. Sedangkan motivasi adalah sesuatu yang membuat orang bertindak atau berperilaku dalam cara-cara tertentu. Memotivasi orang adalah menunjukkan arah tertentu kepada mereka dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahwa mereka sampai kesana. Bermotivasi adalah ingin pergi ke suatu tempat berdasarkan keinginan sendiri, atau terdorong oleh apa saja

⁶⁰ Michel, Armstrong, *Sert.*, hal. 68-69

yang ada agar dapat pergi dengan sengaja dan untuk mencapai keberhasilan setelah tiba di sana."

Armstrong kemudian membagi motivasi menjadi dua bagian yaitu: (a) motivasi buatan (*extrinsic*): apa yang Anda lakukan terhadap orang untuk memotivasi mereka; dan (b) motivasi hakiki (*intrinsic*): faktor-faktor dari dalam diri sendiri yang mempengaruhi orang untuk berperilaku atau untuk bergerak ke arah tertentu.

Dengan demikian motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan orang untuk mencapai tujuan organisasi. Memberikan motivasi adalah memastikan bahwa orang bergerak ke arah yang kita inginkan agar mereka kerjakan dan apa yang ingin mereka kerjakan tidaklah perlu bersamaan. Sasaran motivasi adalah untuk mencapai rasa memiliki tujuan bersama dengan memastikan bahwa sejauh mungkin keinginan dan kebutuhan organisasi serta keinginan dan kebutuhan para anggotanya berada dalam keadaan yang harmonis.

b. Komite Sekolah Mendorong Partisipasi Masyarakat

Untuk mendorong masyarakat agar secara sadar berpartisipasi terhadap sekolah, bukanlah pekerjaan mudah. Tapi membutuhkan pikiran, tenaga, dan waktu atau proses yang panjang. Masyarakat tidak serta merta mendukung program partisipasi terhadap sekolah, sebelum mereka memahami dan menyadari apa itu partisipasi. Setelah masyarakat menyadari dan memahami, tentang pentingnya peran mereka terhadap sekolah, belum tentu juga, mereka akan serta merta

langsung bergabung dengan sekolah untuk berpartisipasi. Tapi ada tahapantahapan lain yang menentukan mereka bergabung atau tidak dengan sekolah. Tahapan-tahapan lain yang dimaksud adalah seberapa besar manfaat yang diberikan pihak sekolah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika menguntungkan kepentingan mereka, maka mereka akan bergabung dengan sekola, jika tidak memberikan manfaat, maka mereka akan mencari sekolah lain yang akan menjanjikan harapan mereka. Proses ini oleh Amrstrong⁶¹ disebut proses motivasi. Proses motivasi dimulai oleh seseorang yang mengenali secara sadar atau tidak suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi.

Proses ini menurut Amrstrong dapat digambarkan sebagai berikut:



GAMBAR 2.3

PROSES MOTIVASI

Proses motivasi dipengaruhi oleh dua hal yaitu: (a) pengalaman. Orang belajar dari pengalaman masa lalu. Ketika pengalaman di dalam mengambil tindakan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka masyarakat

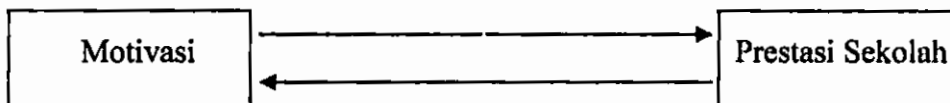
⁶¹ *Ibid.*, hal. 70

memandang bahwa tindakan tersebut membantu mencapai sasaran mereka. Jika, pengalaman masyarakat sebelumnya kurang begitu berhasil, maka masyarakat kemudian enggan berpartisipasi terhadap sekolah tersebut; dan (b) harapan. Kekuatan harapan sesungguhnya mungkin didasarkan kepada pengalaman masa yang lalu. Masyarakat berpartisipasi terhadap sekolah, tetapi mereka menaruh harapan yang besar terhadap sekolah tersebut. Jika, harapannya terpenuhi, maka partisipasi masyarakat pun meningkat, jika tidak, maka masyarakat kemudian hilang kepercayaan terhadap sekolah tersebut, bahkan menarik dukungannya terhadap sekolah tersebut dan mencari sekolah yang lain sesuai harapannya.

Jika, pihak komite dan sekolah ingin mendapatkan partisipasi masyarakat luas yang sebesar-besarnya, maka aspek yang terpenting adalah bagaimana komite dan sekolah harus memahami apa yang menjadi motivasi masyarakat dalam mencapai kebutuhannya. Karena tanpa memahami apa yang menjadi motivasi masyarakat yang diajak untuk bergabung dengan sekolah tersebut, maka masyarakatpun sulit untuk bergabung dengan sekolah tersebut.

Untuk itu, sekolah perlu meningkatkan prestasi-prestasi atau mutu sekolah yang sedang menjadi trend di masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas sekolah dan berbagai prestasi yang dicapai, maka komite dan sekolah tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan partisipasi masyarakat. Karena menurut Armstrong, hubungan antara motivasi dan prestasi adalah sesuatu yang positif. Dalam pengertian bahwa meningkatnya

partisipasi masyarakat terhadap sekolah akan menghasilkan lebih banyak usaha dan prestasi sekolah yang lebih baik. Bentuk hubungannya adalah hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi, sebagaimana gambar berikut:



GAMBAR 2.4

HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI DAN PRESTASI SEKOLAH

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Konsep MBS

Istilah MBS merupakan terjemahan dari "*school-based manajemen*". Muncul pertama kali di Amerika tahun 1970-an sebagai alternatif untuk mereformasi pengelolaan pendidikan. Reformasi diperlukan karena kinerja sekolah selama puluhan tahun gagal menunjukkan peningkatan berarti, memenuhi tuntutan perubahan lingkungan sekolah. Tuntutan perubahan lingkungan sekolah antara lain: tuntutan dunia kerja, IPTEK, sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Lulusan sekolah pada saat itu di bawah standar tuntutan berbagai bidang kebutuhan yang mengakibatkan kekecewaan banyak kalangan yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶²

Menurut Slamet, bahwa MBS terdiri atas tiga asal kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen berarti koordinasi dan penyerasian sumberdaya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai

⁶²Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi*, Jakarta:Grasindo, 2003, hal. 24

tujuan atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Berbasis artinya "berdasarkan pada" atau "berfokus pada". Dan sekolah merupakan organisasi terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional yang bertugas memberikan "bekal kemampuan dasar" kepada peserta didik atas dasar ketentuan yang bersifat legalistik (makro, meso, mikro) dan profesionalistik (kualifikasi untuk SDM).

Slamet menyimpulkan, MBS adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otonomi oleh sekolah melalui sejumlah *input* manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (*partisipatif*). Kelompok kepentingan meliputi: kepala sekolah dan wakilnya, guru, siswa, konselor, tenaga administratif, orang tua siswa, tokoh masyarakat, para profesional, wakil pemerintah, wakil organisasi pendidikan.⁶³

Dalam tinjauan A. Garton menyebut MBS identik dengan *school and the community* (sekolah dan masyarakat). Menurutnya *school and community* adalah suatu rumusan dasar tentang masalah-masalah hubungan antara sekolah dan masyarakat (Stokholder), yang erat berkaitan dengan iklim kehidupan masyarakat dan sekolah.⁶⁴

MBS sebagai paradigma baru dalam mengelola pendidikan nasional, merupakan inovasi kebijakan pendidikan baru yang harus dikembangkan

⁶³ Departemen Pendidikan Nasional; Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*, Jakarta, 2004, hal. 25,26

⁶⁴Richard, A.Garton, *School Administration*, (Dubuque Iowa:Wm.C.Brwn Campany,1976), hal. 374

dalam rangka memecahkan kompleksitas persoalan pendidikan. Konsep MBS mengedepankan peningkatan mutu terpadu, sehingga dapat dijadikan kebijakan strategis dalam implementasi pendidikan yang diprakarsai sekolah dan daerah. Terwujudnya konsep ini apabila didukung oleh partisipasi penuh dari segenap masyarakat atau *stakeholdersnya*. Tanpa partisipasi, MBS seperti kehilangan ruh. Hal ini seperti apa yang dinyatakan oleh Suryadi, "MBS merupakan paradigma baru pengelolaan pendidikan yang bertujuan mengembalikan sekolah kepada pemilik atau *stakeholders* asli, yaitu masyarakat"⁶⁵ Fatah⁶⁶ menyebut MBS adalah pendekatan politik, bertujuan mendesain ulang, pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, KS/M, orang tua siswa, dan masyarakat. MBS mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat lokal (*local stakeholder*).

1. Latar Belakang Historis MBS

Meskipun Departemen Pendidikan Nasional menganggap MBS merupakan model baru dalam kebijakan pendidikan nasional, akan tetapi banyak kalangan menilai bahwa kebijakan tersebut sudah pernah diterapkan pada era pemerintahan Sukarno. "M. Surya ketua PGRI, yang diwawancarai tim peneliti ICW, menilai bahwa jauh sebelum konsep ini

⁶⁵ Faisal Sanapiah et.al., *Partisipasi*, hal. 4

⁶⁶ Nanang Fatah, *Konsep*, hal. 5

dibicarakan, Indonesia sebenarnya sudah sempat menerapkannya sekitar tahun 1950-an. Namanya memang bukan MBS, tetapi esensi yang dibawah sama⁶⁷”. Kesempatan lain B.Sudjanto menyatakan hal yang samu, bahwa Indonesia sejak lama telah menjalankan MBS. Walaupun kemudian terpotong ketika Suharto memimpin. Menurut Sudjanto pada awal 1960-an, yang mendirikan dan mengelola sekolah adalah masyarakat, kemudian diubah menjadi alat untuk mereproduksi nilai-nilai rezim Orde Baru melalui kebijakan-kebijakannya. Digulirkannya SD Inpres oleh pemerintah Orde Baru pada 1970-an, menandai kembalinya peran negara dalam pendidikan. Bahkan negara berperan pada hal-hal terkecil dalam sekolah, seperti penentuan seragam. Keadaan inilah kemudian terkuburnya MBS versi lama⁶⁸”. Menurut Tilaar, pemerintah memang sengaja menghancurkan sekolah-sekolah yang dibangun masyarakat. Dibuat dan diciptakan *image*, sekolah negeri dibuat negara jauh lebih baik dibanding sekolah swasta. Pada hal menurut Tilaar, dulu sekolah swasta yang dikelola masyarakat berkembang sangat pesat⁶⁹”. Tilaar memberi contoh pesantren. Pesantren adalah suatu sistem kehidupan yang lahir dan dibesarkan dalam suatu masyarakat demokratis.

Terlepas dari pro dan kontra soal keberadaan MBS di Indonesia, yang jelas legal formal MBS baru diterapkan pasca reformasi. Dampak

⁶⁷Ade Irawan, et.all., *Mendagangkan Sekolah: Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di*, Cet I (DKI Jakarta, Indonesia Corruption Watch,2004), hal. 38

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 50

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 50-51

reformasi mendorong otonomi terhadap segala aspek kehidupan. Salah satu dampak yang dirasakan secara langsung bagi dunia pendidikan adalah otonomi sekolah yang dituangkan dalam konsep MBS. MBS ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 2000. Keputusan ini kemudian diikuti oleh sekolah di semua level SD/MI hingga SMA/MA.

2. Tujuan dan Manfaat MBS

MBS ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi antara lain, diperoleh melalui keleluasaan mengolah sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif serta disinsentif. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerataan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan karena pada sebagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sekolah.⁷⁰ Fatah,⁷¹ menyebutkan MBS adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan

⁷⁰ Mulyasa, *Manajemen.*, hal. 25

⁷¹ Nanang Fatah., *Konsep.*, hal. 5

partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, KS/M, orang tua siswa, dan masyarakat. Selain itu, MBS memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi siswa yang dikarenakan adanya peningkatan penggunaan sumber daya dan personal, peningkatan profesionalisme guru dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan.⁷²

MBS mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat lokal (*local stakeholder*). Menurut Mulyasa⁷³ setidaknya terdapat beberapa manfaat MBS, diantaranya adalah: (a) memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar kepada sekolah disertai seperangkat tanggung jawab; (b) otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi MBS sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas; (c) keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah; (d) memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum, guru didorong untuk berinovasi dengan melakukan eksperimentasi-eksperimentasi dilingkungan sekolahnya, dengan demikian mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin

⁷² Drury and Levin, *School-Based Management*, ERIC Eugene OR, 1995, ha. 99

⁷³ Mulyasa, *Manajemen.*, hal. 27

pendidikan di sekolah; (e) penyusunan-penyusunan kurikulum seloklil, rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi orang tua, misalnya orang tua dapat mengawasi langsung proses belajar anaknya; (f) MBS menekankan keterlibatan maksimal berbagai pihak, seperti pada sekolah-sekolah swasta, sehingga menjamin partisipasi staf, orang tua, peserta didik, dan masyarakat luas dalam perumusan-perumusan keputusan tentang pendidikan, hal ini kemudian akan meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah; (g) sebagai kontrol dari masyarakat dan monitoring dari pemerintah, pengelolaan sekolah menjadi lebih akuntabel, transparansi, egaliter, dan demokratis, serta menghapuskan monopoli dalam pengelolaan pendidikan; (h) prestasi peserta didik dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi orang tua.

3. Alasan Penerapan dan Dasar Kebijakan MBS

Departemen Pendidikan Nasional memberikan sepuluh alasan penerapan MBS, yaitu: (a) dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah, maka sekolah akan lebih aktif atau kreatif meningkatkan mutu sekolah (b) dengan pemberian fleksibilitas atau keluwesan-keluwesan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber dayanya, sekolah akan lebih luwes dan lincah dalam mengadakan dan memanfaatkan sumber daya sekolah secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah (c) sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang,

dan ancaman bagi dirinya sehingga ia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber dayanya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya (d) sekolah lebih mengetahui lembaganya, khususnya *in put* pendidikan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik; (e) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa yang terbaik bagi dirinya; (f) penggunaan sumber daya xpendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat; (g) keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat; (h) sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan kepada masing-masing pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan; (i) sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya inovasi dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan Pemerintah Daerah setempat; (j) sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat.

Kebijakan MBS ditandai dengan UU No.22/1999 tentang pemerintahan otonomi daerah. Kemudian UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Daerah, dan PP No.25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom. Dan pemerintah memperkuat pelaksanaan MBS melalui UU RI No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4. Dua Pilar MBS

MBS merupakan paradigma baru manajemen pengelolaan pendidikan di era reformasi. Eksistensinya hanya mampu bertahan pada sistem pemerintahan yang demokratis. Begitu juga di sekolah, MBS dapat berjalan efektif dan efisien bila kepala sekolahnya memiliki model kepemimpinan demokratis. Jika tidak maka di sana terdapat kepincangan-kepincangan dalam pengelolaan dan pengendalian mutu pendidikan. Karena konsep MBS menghendaki sistem pengelolaan pendidikan yang demokratis, transparansi, dan akuntabilitas.

Agar partisipasi masyarakat berjalan efektif, efisien, dan optimal dengan prinsip demokratis, transparansi, dan akuntabilitas, maka pemerintah membentuk wadah partisipasi masyarakat sebagai pilar penegak MBS yakni, DP dan KS/M. Kedua lembaga ini dibentuk sebagai wadah menampung dan menyalurkan aspirasi dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam panduan umum DP dan KS/M bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi,

transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah DP di tingkat kabupaten/kota dan KS/M ada pada tingkat satuan pendidikan⁷⁴”

a. Dewan Pendidikan

Dewan Pendidikan merupakan badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota. Namanya bersifat generik, karena bisa diganti dengan nama lain yang sesuai kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Lembaga ini bersifat otonom dan tidak mempunyai hubungan hierarkhis dinas pendidikan kabupaten/kota maupun lembaga pemerintah lainnya.

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui Dewan pendidikan, yaitu: (a) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan; (b) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; (c) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

DP juga berperan sebagai pemberi member pertimbangan (*advisory agency*); pendukung (*supporting agency*); pengontrol (*controlling agency*); mediator antara pemerintah dengan masyarakat disatuan pendidikan.⁷⁵

⁷⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikdasmen, *Pandauan*, hal. 33

⁷⁵ *Ibid.*

Dewan Pendidikan juga menjalankan beberapa fungsi: (a) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (b) melakukan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (c) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang oleh masyarakat; (d) memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai: (1) Kebijakan dan program pendidikan; (2) Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan; (3) Kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor kepala satuan pendidikan; (4) Kriteria fasilitas satuan pendidikan; (5) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan; (e) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan; (f) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

b. Komite Sekolah/Madrasah (KS/M)

KS/M adalah nama atau badan yang berkedudukan di sekolah, baik pada jalur sekolah maupun jalur luar sekolah atau beberapa sekolah yang sama di suatu kompleks yang sama. Nama KS/M merupakan nama generik. Artinya, nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah, seperti Komite Sekolah, Komite

pendidikan, Komite luar sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati.⁷⁶

UU Sisdiknas No.20/2003 BAB I, pasal 1 ayat 25 menyebutkan bahwa KS/M adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua dan/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan⁷⁷. Dalam Panduan DP dan KS/M, KS/M merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politik, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.⁷⁸

KS/M merupakan sebuah lembaga otonom yang mewadahi partisipasi masyarakat yang dibentuk pemerintah dengan tujuan umumnya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sementara MBS juga merupakan sebuah instrumen kebijakan pemerintah yang memberi otonomi yang luas kepada satuan pendidikan untuk mengelola sekolahnya dalam rangka mencapai mutu pendidikan nasional. Konsep implementasi MBS menuntut adanya bentuk partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan proses pendidikan. Sementara bentuk partisipasi masyarakat terhadap sekolah diwujudkan berupa KS/M. Sehingga KS/M dianggap sebagai ruh atau sub sistem dari MBS.

⁷⁶ *Ibid.*, hal.20

⁷⁷ UU Nomor 20 tahun 2003, *tentang.*, Hal. 75

⁷⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Panduan.*, hal. 18

Sebagai sebuah lembaga modern tentunya KS/M memiliki suatu sistem kelembagaan tersendiri untuk menjalankan peran, fungsi dan tugas pokoknya. Fungsi sistem kelembagaan inilah yang kemudian akan mengelola, mengatur, membina dan membangun lembaga KS/M. Lembaga ini dalam implementasinya merupakan bagian dari pelaksanaan MBS itu sendiri. Karena lembaga ini secara khusus dibentuk sebagai wadah berkumpulnya masyarakat luas berpartisipasi terhadap sekolah. Sementara implementasi MBS juga membutuhkan partisipasi masyarakat luas. Karena KS/M merupakan bagian atau sub sistem dari MBS, maka untuk mengukur keberhasilan/kesuksesan kinerja lembaga KS/M kita dapat melihat pada unsur-unsur pembentuk sistem itu berjalan secara efektif dan efisien atau tidak. Dalam KS/M adalah UU, PP, Kepmendiknas, keputusan KS/M dan keputusan kepala madrasah.

C. Pola Kerja Partisipasi Masyarakat

Untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap madrasah, di samping menggunakan pendekatan teori gerakan sosial, motivasi, dan konsep Agama, seperti diuraikan di awal, pendekatan yang lain untuk mendorong partisipasi masyarakat luas terhadap sekolah adalah meletakkan orang-orang yang tepat pada posisi ketua komite sekolah dan kepala sekolah. Dua posisi ini memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya membangun dan mengelola lembaga pendidikan menjadi sekolah yang bermutu dan kompetitif.

Dengan demikian, masyarakat (kelompok ekonomi menengah keatas) berbondong-bondong berpartisipasi untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang dimaksud. Sehingga harapannya, sekolah akan mendapatkan partisipasi yang lebih besar, khususnya dari orang tua siswa yang memiliki kemampuan ekonomi. Karena itu, ideologi, motivasi, dan Agama saja tidak cukup untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap sekolah. Dengan demikian, untuk mendorong partisipasi masyarakat luas agar berpartisipasi terhadap sekolah, maka diperlukan bentuk dan pola kerja yang terukur, terarah, dan sistemik. Esensi pokok penerapan pelembagaan partisipasi masyarakat dalam bentuk KS/M adalah bersama sekolah meningkatkan mutu pendidikan nasional. Mutu, menurut Arcaro (2007) adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Mutu sesuatu yang terukur dan rasional". Dalam "Winston Dictionary (1956), seperti dikutip oleh Azwar,⁷⁹ menyebutkan bahwa, mutu adalah tingkat kesempurnaan dari penampilan sesuatu yang sedang diamati.

Dan pemerintah telah menetapkan standar mutu secara nasional, yang dituangkan dalam PP No. 19/2005. Standar mutu ini, kemudian menjadi acuan lembaga partisipasi masyarakat dan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Pada Bab II, pasal 2 PP No. 19/2005, meliputi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu: (1) standar isi: mencakup: lingkup materi dan tingkat kompetensi: memuat kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender

⁷⁹ Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996, hml.

pendidikan/akademik; (2) standar proses: (pasal 19 ayat 1) dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup untuk bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik; (3) standar kompetensi lulusan (pasal 25:2) kompetensi untuk seluruh mata pelajaran. Pasal 26: meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan (pasal 28: 3 kompetensi guru). (pasal 35: tenaga kependidikan: kepala sekolah, Tata Usaha (TU), tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan); (5) standar sarana dan prasarana (pasal 42:1) perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan). Ayat 2: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang TU, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang menunjang. (pasal 43:1) laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan belajar lain; (6) standar pengelolaan (pasal 49:1) menerapkan MBS yang ditunjukkan dengan: kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas; (7) standar

pembiayaan (pasal 62:1) biaya investasi, biaya operasional, biaya personal; dan (8) standar penilaian pendidikan.

Untuk mencapai standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah ini dan agar masyarakat tergerak untuk berpartisipasi terhadap sekolah, maka ada enam pola yang sistemik, yang menjadi fokus perhatian pihak komite dan sekolah. Enam pola ini disebut juga sebagai unsur-unsur sistem yang saling terkait yang kemudian disebut dengan sistem. Sistem sebagaimana tersebut diatas sebagai gabungan dari elemen-elemen yang saling dihubungkan oleh suatu proses atau struktur dan berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam upaya menghasilkan sesuatu yang telah ditetapkan”, atau suatu struktur konseptual yang terdiri dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan dalam organisasi yang bekerja sebagai satu unit organik dalam bentuk administrasi, kepemimpinan, dan manajemen untuk mencapai keluaran yang diinginkan secara efektif dan efisien.

Enam unsur tersebut adalah masukan (*in put*), proses (*process*), keluaran (*out put*), hasil (*out come*), manfaat (*benefict*), dan dampak (*impact*).⁸⁰ Pertama, masukan (*in put*). Adalah kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem dan yang diperlukan untuk dapat berfungsi sistem tersebut. “Koont dan Donnells memasukkan manusia (*man*), modal (*capital*), manajerial (*managerial*), dan teknologi (*technology*).⁸¹

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 6

⁸¹ *Ibid.*, hal. 8

Kedua, proses (*proces*). Gaspersz⁸² memaknai proses sebagai integrasi sekuensial dari orang, material, metode, dan mesin atau peralatan dalam suatu lingkungan guna menghasilkan nilai tambah *out put* untuk pelanggan. Suatu proses mengkonversi *in put* terukur kedalam *out put* terukur melalui sejumlah langkah sekuensial yang terorganisasi. Sedangkan R. Terry Memasukkan dalam tahap ini yang terangkum dalam POAC, yaitu perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).⁸³ Indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran. Aspek awal terpenting dalam proses ini adalah *planing* (perencanaan). Para pakar manajemen menyatakan, apabila perencanaan telah selesai dan dilakukan dengan benar, sebagaimana pekerjaan besar telah selesai dilaksanakan.⁸⁴

Ketiga, aspek Keluaran (*Out Put*). Adalah kumpulan bagian atau elemen yang dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam system.⁸⁵ Atau sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik yang belum dimanfaatkan. Dengan membandingkan keluaran, institusi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan berjalan sesuai rencana. Indikator keluaran hanya dapat menjadi landasan

⁸² Vincent, Gaspersz, *Manajemen Produktivitas Total: Strategi Peningkatan Produktivitas Bisnis Global*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998, hal. 210

⁸³ Azrul Azwar, *Pengantar*, hal. 8

⁸⁴ Udin Syaefudin, Saud & Abin Syamsuddin, Makmun, *Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif*, Cet 1 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), hal 4

⁸⁵ Azrul Azwar, *Pengantar*, hal. 22

untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan teratur.

Keempat, aspek hasil (*out come*): kumpulan bagian atau elemen yang merupakan keluaran dari sistem dan sekaligus sebagai masukan bagi sistem tersebut.⁸⁶

Kelima, aspek manfaat (*benefict*): kumpulan atau elemen yang merupakan keluaran dan memberikan manfaat bagi costumer/pelayan/publik.

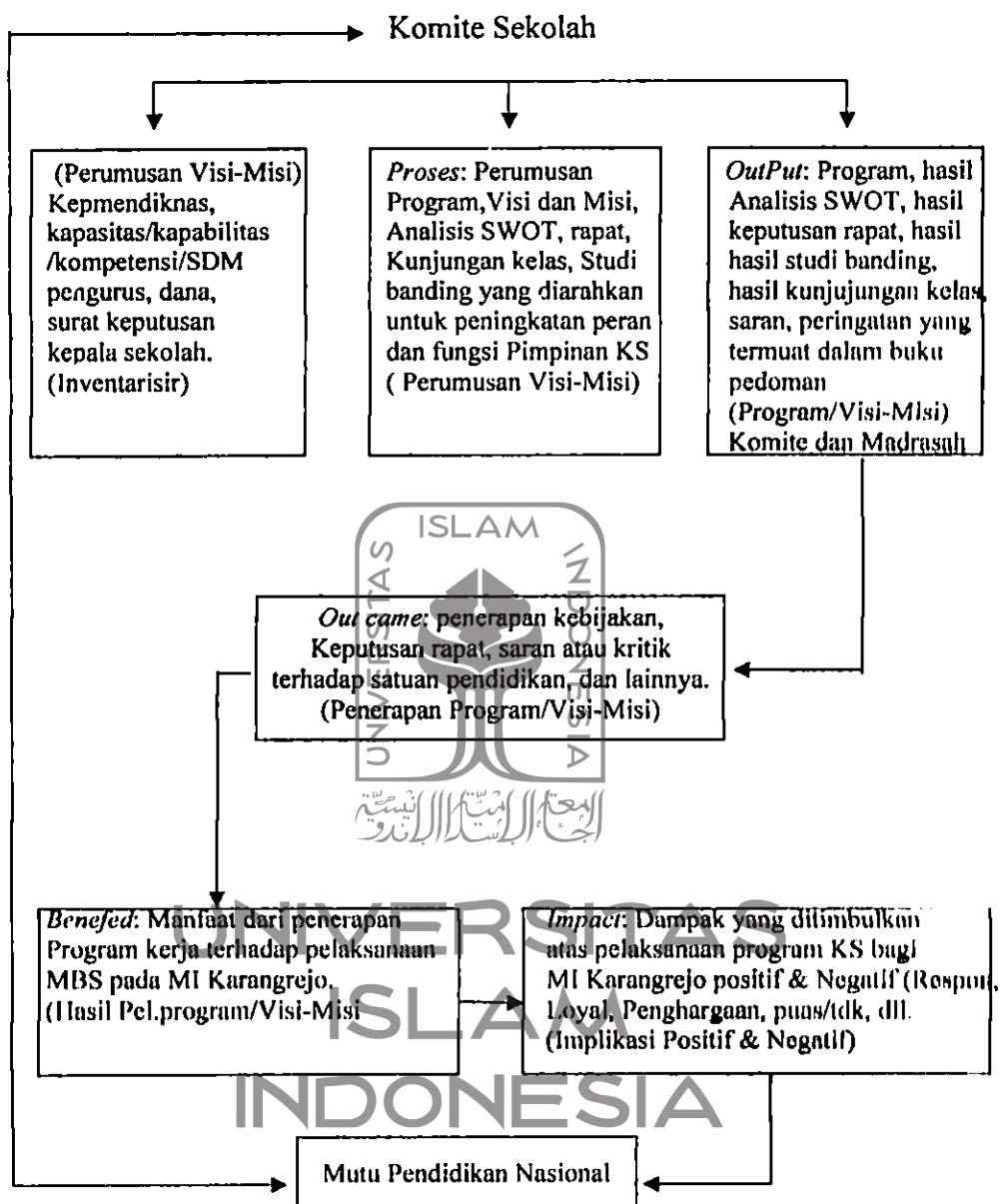
Keenam, aspek dampak (*impact*): akibat yang ditimbulkan oleh keluaran (*out put*).⁸⁷ Implikasi ini bisa positif atau bisa negatif. Implikasi positif ditandai dengan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Sedangkan implikasi negatif dapat berupa terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat terhadap sekolah.

Unsur-unsur tersebut diatas dapat digambarkan berikut ini:

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*



GAMBAR 2.5

BENTUK DAN POLA KERJA KS/M DAN SEKOLAH

1. Kriteria Komite Sekolah Mendorong Partisipasi

Bahwa mendorong masyarakat luas untuk berpartisipasi terhadap sekolah bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk itu, badan yang memiliki wewenang, seperti Komite Sekolah dan Kepala Sekolah, setidaknya

memiliki kompetensi dibidang masing-masing. Baik kompetensi kepemimpinan, manajemen, dan kemampuan untuk menggerakkan dan mendorong partisipasi agar tercapai mutu.

Sebagaimana rekomendasi tim peneliti Faisal *et.all.*⁸⁸ menunjukkan bahwa, untuk bisa mendorong partisipasi masyarakat kouruh *school ownership* membutuhkan prasyarat tertentu sebagai pilar penopangnya, salah satunya adalah institusi pemerintah yang dihori otoritas mengurus pendidikan Dinas Pendidikan sedapat mungkin dipimpin oleh figur yang tepat serta memahami benar hakekat pendidikan. Begitu pula DP, KS/M serta satuan pendidikan harus dinakhodai oleh figur yang tepat dan berkomitmen kuat pada pendidikan, tidak sekedar figur karena semata-mata alasan senioritas dan derajat kepangkatan formal.

Ada beberapa teori tentang kriteria kinerja, diantaranya adalah Castetter mengemukakan empat kriteria kinerja yaitu: (a) karakteristik personil. Dilihat dari aspek ini, kinerja meliputi: kemampuan, keterampilan, kepribadian, dan motivasi untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik; (b) proses. Dari aspek proses, kinerja yang efektif akan tercapai jika perilaku personil dapat menunjukkan kecocokkan dengan standar kinerja yang telah ditentukan; (c) hasil. Dari aspek hasil, kinerja yang dinilai berupa hasil nyata yang dikerjakan oleh pegawai tata usaha, baik dalam kualitas maupun dalam kuantitas; (d) kombinasi a, b, dan c.

⁸⁸ Faisal, Sanapiah *et.all.*, *Partisipasi.*, hal. xvii

Menurut Mitchell yang dikutip oleh Rahman,⁸⁹ ada beberapa kriteria kinerja yang terlihat dalam Area Performance yaitu: (a) kualitas kerja; (b) ketepatan; (c) inisiatif; (d) kemampuan; (e) komunikasi.

Sementara Steers dalam Oedjo(1986) menggunakan tiga faktor penting untuk menilai kinerja, yaitu: (a) kemampuan dan minat pegawai; (b) kejelasan penerimaan atas peranan pegawai; (c) tingkat motivasi pegawai.

Atas dasar ini kemudian Mulyasa⁹⁰ merumuskan kriteria kinerja untuk menilai kinerja pegawai dalam MBS. Kriteria tersebut meliputi: (a) pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab; (b) kemampuan dan keterampilan; (c) semangat yang tinggi; (d) berinisiatif dan berkemauan yang tinggi.

2. Standar dan Rantai Kinerja Partisipasi Masyarakat

Untuk mendapatkan partisipasi masyarakat luas, pola atau cara kerja komite sekolah dan kepala sekolah, minimal dapat memenuhi standar minimal pola kerja. Pola kerja standar adalah pola kerja yang terukur. Standar kinerja ini dapat dibuat dari uraian jabatan untuk mengaitkan definisi jabatan statis ke kinerja kerja dinamis. Standar kinerja dibuat untuk setiap individu dengan berpedoman pada uraian jabatan. Setiap jabatan memiliki lima hingga sepuluh jabatan yang diungkapkan secara spesifik dan dapat diukur yang terdiri atas pernyataan sasaran, bagaimana

⁸⁹ Matthew B, Miles dan Huberman, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI-Press, 1992, hal. 33

⁹⁰ Mulyasa, *Manajeme.*, hal. 125

sasaran tersebut diukur, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

Menurut Alewine (1992) standar kinerja dianggap memuaskan bila pernyataannya menunjukkan beberapa bidang pokok tanggung jawab karyawan atau staff, memuat bagaimana suatu kegiatan kerja akan dilakukan, dan mengarahkan perhatian kepada mekanisme kuantitatif bagaimana hasil-hasil kinerjanya akan diukur. Suatu contoh standar kinerja yang baik adalah: "Kinerja dapat diterima bila 90 persen dari desain sistem umum disajikan kepada pemakai tepat pada waktunya dan pemakai menyetujui desain tersebut".

Kinerja merupakan aspek perilaku manusia dalam melaksanakan tugas dan perannya. Maka, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, komite sekolah dan kepala sekolah sangat dipengaruhi oleh lima aspek yang saling keterkaitan. Saling keterkaitan ini, oleh Bolt dan Rummeler (1992) menyebutnya dengan rantai kinerja. Rantai kinerja ini dapat digambarkan berikut:



UNIVERSITAS
GAMBAR 2.6
ISLAM
RANTAI KINERJA
INDONESIA

Gambar ini, menekankan saling ketergantungan. Kinerja mungkin akan tidak seperti yang diharapkan bila terdapat kelemahan diantara mata rantai ini. Misalnya, meskipun tugasnya jelas, fasilitas terpenuhi, tapi individu beretos rendah, maka akan mempengaruhi pola kerja komite dan sekolah.

Karena itu, komite dan kepala sekolah penting sekali memahami bahwa individu adalah satu mata rantai dalam rantai ini dan produktivitas optimum adalah hasil dari semua mata rantai yang ada dan efektif dalam rantai tersebut. Yang terpenting difahami mata rantai yang paling kecil

untuk gagal, biasanya adalah individu. Rantai kinerja ada dan selalu bekerja, suka atau tidak. Semua kinerja ditentukan oleh efektivitas keseimbangan antara pekerja individu dan lingkungan yang berada di dekatnya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan MI Miftahul Huda

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Madrasah di rumahnya, maka dapatlah penulis susun secara singkat mengenai sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Jati Karanganyar Trenggalek.

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Jati berdiri pada tahun 1992. Latar belakang berdirinya madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda berawal dari tuntutan masyarakat desa Jati yang mayoritas beragama Islam. Sebelum berdirinya MI Miftahul Huda tersebut telah berdiri Madrasah Diniyah, yang mayoritas santrinya dari desa Jati. Untuk menampung aspirasi masyarakat tersebut khususnya agar dapat belajar dengan baik dan berkesinambungan, baik ilmu agama dan umum, maka dibentuklah lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Pada akhirnya lembaga pendidikan tersebut diberi nama " Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda".⁹¹

Sedangkan tokoh – tokoh pendiri Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda tersebut diantaranya :

- a. Muhammad Yusak
- b. H. Marjuni
- c. Nurun Nadzifah

⁹¹ Wawancara dengan M. Zuhrofudin (Kepala MI) di Jati, tanggal 14 September 2010

Pada awal berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda dipimpin oleh Ibu Nurun Nadzifah selaku kepala madrasah pertama mulai tahun 1992 s/d 1997, kemudian diganti oleh Bapak Muhammad Yusak dari tahun 1997 s/d 2004, kemudian digantikan lagi Bapak Suhadji mulai tahun 2004 s/d 2008 dan digantikan Bapak M.Zuhrofudin mulai tahun 2008 sampai sekarang.⁹²

Pada tahun 1992 Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda memperoleh status terdaftar dengan sk. Depag Nomor : 06.02/PP/00.4 tertanggal 27 Desember 1992. Dan pada tahun 2008 berubah status terakreditasi B dari Dinas Pendidikan dan belum berubah statusnya sampai sekarang.⁹³

1. Letak Geografis MI Miftahul Huda

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda berada lebih kurang 500 m dari jalan raya (Karang – Suruh), tepatnya di Dusun Pongkok RT 20 RW 06 Desa Jati Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur.

Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah atau desa yang dapat membatasi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dibatasi dengan desa Kayen
- b. Sebelah Selatan dibatasi dengan desa Mlinjon
- c. Sebelah Barat dibatasi dengan kecamatan Suruh
- d. Sebelah Timur dibatasi dengan desa Karang

⁹² Dokumentasi MI Miftahul Huda, 2010

⁹³ Data Emis MI Miftahul Huda , 2010

Situasi umum mengenai desa tersebut sangat nyaman digunakan untuk proses belajar mengajar, karena lingkungan jauh dari keramaian kota, pasar maupun gedung pertemuan.⁹⁴

2. Visi dan Misi MI Miftahul Huda

a. Islami

Yang dimaksud islami adalah sebagai lembaga pendidikan berciri khas islam, MI Mifdtahul huda berusaha menyampaikan nilai-nilai agama islam setingkat pondok pesantren tingkat awaliyah (Ibtidaiyah) sehingga dalam realitas sehari-hari di MI Miftahul Huda Jati Karang Trenggalek diharapkan terjadi suasana islami yang pada akhirnya para siswa bisa membawa pengaruh dalam kehidupan lingkungan sendiri-sendiri dalam masyarakat.



b. Populis

Yang dimaksud populis oleh MI Miftahul Huda adalah supaya MI Miftahul Huda ini dikenal oleh masyarakat sekitar, sehingga pada akhirnya MI Miftahul Huda menjadi alternatif pertama dan utama bagi siswa dan orang tua untuk mendapatkan pendidikan dasar dilingkungan desa Jati ataupun diluar desa Jati.

c. Kualitas

Disini ditargetkan agar produktifitas belajar di MI Miftahul Huda Jati Karang Trenggalek mampu berda diatas MI/SD lainnya baik negeri

⁹⁴ Profil MI Miftahul Husda, 2010

maupun swasta serta menjadi panutan di desa Jati khususnya dan Trenggalek pada umumnya.

Adapun perwujudan visi dan misi tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam profil MI Miftahul Huda Jati Karanganyar Trenggalek dengan cara :

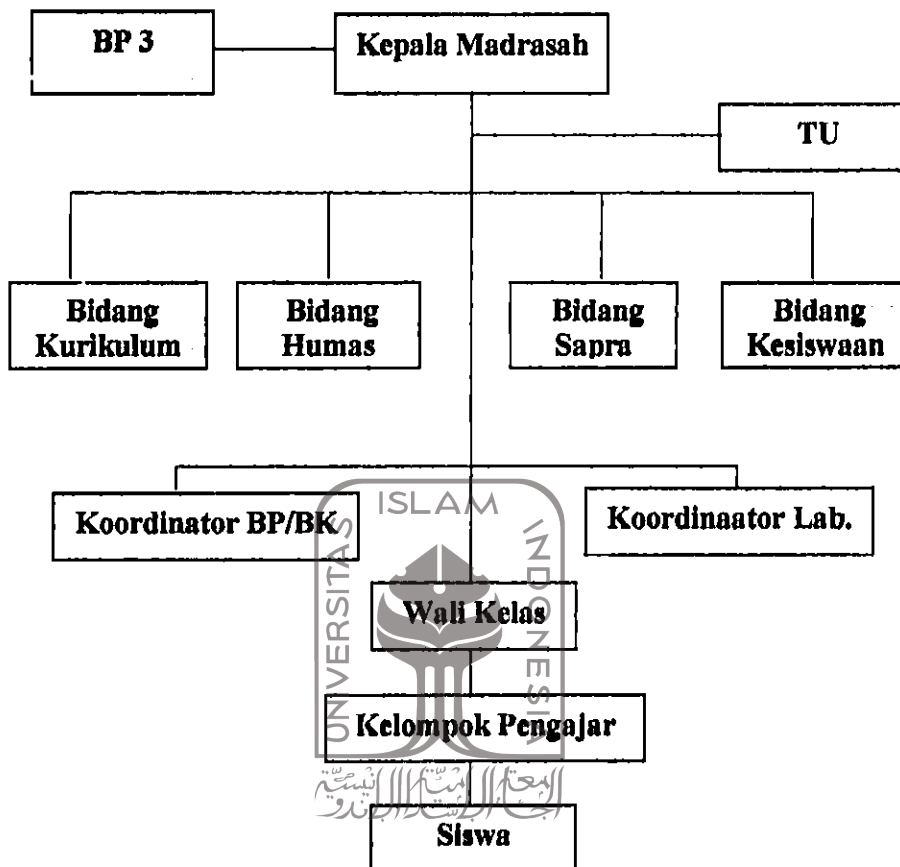
- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme pengelola Madrasah
- 2) Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan secara penuh
- 3) Peningkatan disiplin semua unsur yang ada (guru, karyawan, siswa) di madrasah.
- 4) Peningkatan peran serta masyarakat, sehingga MI Miftahul Huda Jati Karanganyar Trenggalek bersifat sekolah yang berbasis pada masyarakat.
- 5) Peningkatan anak didik melalui jalur full day dan les secara keseluruhan siswa dan terus menerus.⁹⁵

MI Miftahul Huda Jati Karanganyar Trenggalek ini melaksanakan berbagai cara yang diharapkan bisa menerapkan visi dan misinya dalam proses belajar mengajar sehari-hari. Ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa MI Miftahul Huda benar-benar islami, populis dan berkualitas.

3. Struktur Organisasi

Untuk mengetahui sejarah jelas tentang Struktur Organisasi MI Miftahul Huda Jati Karanganyar Trenggalek dapat dilihat pada bagan berikut :

⁹⁵ Dokumen MI Miftahul Huda, 2010



BAGAN 3.1

**STRUKTUR ORGANISASI MI MIFTAHUL HUDA
TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

Sumber : Dokumen MI Miftahul Huda, 2010

B. Keadaan Guru dan Siswa

1. keadaan Tenaga Pendidik

Guru sebagai tenaga pendidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini karena pendidik adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar. Tenaga pengajar atau pendidik di MI Miftahul Huda Jati Karang Trenggalek adalah, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Data Pengajar MI Miftahul Huda Tahun 2010/2011

NO	NAMA	PENDIDIKAN	BIDANG STUDI	JABATAN
1	M. Zuhrofudin, S.Ag	S1	BP	Kepala MI
2	Drs. Aju Diantoro	S1	Guru Kelas VI	Bidang Kurikulum
3	Ulva Khoiriyah, S.Ag	S1	Guru Kelas I	Bidang Kesiswaan
4	Sudarti, S.Pd.I	S1	Guru kelas IV	Bidang Sapro
5	Nurul Laela, S.Pd.I	S1	Guru kelas V	Bidang Humas
6	Nurul Hidayah, A.Ma	D2	B. Arab	Guru
7	Siti Khotimah, S.Pd.I	S1	Guru Kelas III	Guru
8	Siti Rohmiati, S.Pd.I	S1	Guru Kelas II	Guru
9	Farid Kurniawan, S.Pd	S1	B. Inggris	Guru
10	Agung Widodo	SLTA	Penjaskes	Guru
11	Sri Mulya Sari, S.Pd	S1	B. Jawa	Guru
12	Tanti Yuliatna, S.Pd	S1	PLH	Guru
13	Yudi Prasetya	SLTA	SBK	Guru
14	Suci Islamiati	SLTA	-	TU
15	Suhari	SLTA	-	Penjaga

Sumber : Dokumentasi MI Miftahul Huda, 2010

Dilihat dari kualifikasi pendidik melalui taman belajarnya diatas, dapat diketahui bahwa pendidik di MI Miftahul Huda ini relatif baik, sebab rata-rata pendidikannya adalah Strata I (S1).

2. Data Siswa MI Miftahul Huda

Siswa merupakan bagian dari faktor-faktor pendidikan, maka keberadaan siswa tidak dapat digantikan oleh yang lain. Data siswa Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Jati Karanggen Trenggalek adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Data Siswa Mi Miftahul Huda Tahun 2010/2011

NO	KELAS	JUMLAH SISWA		TOTAL
		L	P	
1	I	21	19	40
2	II	16	22	38
3	III	22	15	37
4	IV	12	23	35
5	V	16	14	30
6	VI	17	15	32
	Jumlah	104	108	212

Sumber : Dokumen MI Miftahul Huda, 2010

C. Program Keunggulan Dan Fasilitas Pendidikan

1. Program unggulan melalui program Full Day, meliputi:

- a. pendidikan teknologi Dasar (PTD) meliputi : Teknik informatika, menggambar teknik, elektronika dasar, listrik dasar, kerja kayu, bongkar pasang.
- b. program pendalaman MIPA
- c. Program pendidikan komputer
- d. Program pendalaman bahasa arab dan bahasa inggris
- e. Seni baca Al qur'an

2. Fasilitas pendidikan

Fasilitas penunjang yang dimiliki MI Miftahul Huda

- a. Masjid Al Khoiriyah
- b. Perpustakaan

- c. Laboratorium komputer
- d. Ruang praktek PTD
- e. lapangan Terpadu (tenis Lapangan, Bola Voly, Bulu Tangkis)
- f. Seperangkat alat kesenian.⁹⁶



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁹⁶ Dokumentasi MI Miftahul Huda, 2010

BAB IV

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MIFTAHUL HUDA

A. Bentuk Lembaga Partisipasi Masyarakat Di MI Miftahul Huda

Partisipasi masyarakat di MI Miftahul Huda , terbentuk dalam empat wadah lembaga partisipasi. Empat wadah lembaga tersebut adalah: (1) partisipasi orang tua siswa secara khusus terhimpun dalam bentuk partisipasi orang tua wali, yang disebut dengan Paguyuban Orang Tua Siswa (POS); (2) partisipasi masyarakat luas atau *stakeholders* (pengusaha, masyarakat, orang tua siswa, pihak sekolah, tokoh pendidikan, politik, LSM, dan lainnya) terhimpun dalam Komite Sekolah/Madrasah (KS/M); (3) partisipasi alumni; dan (4) partisipasi masyarakat dalam bentuk *partnership* atau kerjasama yang mendukung program MI Miftahul Huda yang saling menguntungkan melalui lembaga *public relation* (Humas). Untuk melihat lembaga dan bentuk-bentuk partisipasinya dapat diuraikan berikut ini:

1. POS dan Bentuk Partisipasinya

POS merupakan lembaga yang secara khusus menampung seluruh orang tua siswa. Lembaga ini dipilih secara demokratis dan transparan oleh orang tua siswa. Keberadaan lembaga ini terdapat pada setiap kelas. Fungsi POS sangat membantu MI Miftahul Huda, terutama membantu guru wali kelas dalam biaya kegiatan kesiswaan. Di samping itu juga, POS merupakan media komunikasi antara orang tua siswa, guru, anak didik, dan

sekolah secara umum. Dengan POS dapat bebas berkomunikasi dengan guru-guru wali. Dan terbuka dan komunikatif terutama dengan guru-guru wali.⁹⁷

Wujud nyata partisipasi orang tua siswa terhadap MI Miftahul Huda dapat diidentifikasi ke dalam 3 bentuk yaitu: (1) partisipasi dalam bentuk menyekolahkan putra-putrinyan di MI Miftahul Huda; (2) partisipasi dalam bentuk finansial, barang, dan jasa; dan (3) partisipasi dalam bentuk sumbangsi pemikiran, saran, dan kritik.

Pertama, partisipasi orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya di MI Miftahul Huda. Untuk partisipasi dalam bentuk ini, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk melihat perkembangan angka partisipasi siswa sejak awal kelahirannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Partisipasi Siswa dari Tahun ke Tahun

Periode	Nurun Nadhifah 1992 - 1997	Muhammad. Yusak 1997 - 2004	Suhadji 2004 - 2008	M. Zuhrofudin 2008 -
Rata-Rata Siswa/Tahun	15 - 20	20 - 30	25 - 30	30 - 40

Sumber Data: Dokumen dan Profil MI Miftahul Huda, 2010

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa perkembangan angka partisipasi siswa setiap tahunnya mengalami peningkatan, yaitu dari angka partisipasi 15 pada tahun 1992. Sementara pada akhir 1997, angka partisipasi mencapai 20 siswa. Pada awal kepemimpinan M. Yusak, 1997, angka partisipasi naik menjadi 20, dan pada akhir kepemimpinannya tahun 2004,

⁹⁷Wawancara dengan Ani (wali siswa) di Jati, tanggal 15 Nopember 2010.

angka partisipasi mencapai 30. Angka partisipasi ini meningkat pada masa Suhadji mencapai 25. Dan pada masa M Zuhrofudin, angka partisipasi mencapai 40 pada tahun pelajaran 2010/2011.

Untuk melihat besar kecilnya tingkat partisipasi terhadap MI Miftahul Huda, dapat pula dilihat dari aspek minat yang daftar di MI Miftahul Huda Sejak kepemimpinan di bawah M Zuhrofudin dan Musiri, minat masyarakat cukup tinggi. Hampir setiap tahunnya, MI Miftahul Huda membuka pendaftaran bagi 40 siswa. Perkembangan ini juga dapat dilihat pada tahun ajaran 2010/2011 MI Miftahul Huda membuka pendaftaran pada tanggal 22 Juni 2010, dengan formasi 40 siswa, namun yang mendaftar mencapai lebih dari 50 siswa. Dan menurut data terakhir tahun pelajaran 2010/2011, MI Miftahul Huda memiliki 6 ruang kelas untuk menampung ^{minid} 240 siswa. Angka-angka partisipasi ini, merupakan indikator bahwa MI Miftahul Huda merupakan sekolah berpartisipasi tinggi.

Kedua, partisipasi orang tua siswa dalam bentuk finansial barang, dan jasa. Partisipasi orang tua siswa dalam bentuk ini dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu: partisipasi finansial dalam bentuk sumbangan pendidikan; partisipasi finansial dalam bentuk amal jariyah lembaga POS; partisipasi finansial melalui amal Jum'ad, amal Ramadhan, zakat, infaq, dan shadaqah; dan partisipasi dalam bentuk barang finansial. Adapun bentuk-bentuk partisipasi tersebut di atas dapat diuraikan berikut:

Partisipasi finansial dalam bentuk sumbangan pendidikan, dapat berupa: membayar uang formulir, uang masuk, dan uang SPP. Untuk uang formulir sebesar lima puluh ribu rupiah bagi seluruh siswa yang mengikuti tes masuk di MI Miftahul Huda. Untuk uang masuk diistilahkan dengan amal jariyah, untuk tahun ajaran 2010/2011 ditetapkan lima puluh ribu. Sistem pembayarannya secara tunai dan dicicil. Secara cicil biasanya bagi orang tua siswa yang kurang mampu. Meskipun telah diberikan keringanan mencicil uang masuk bagi orang tua siswa yang memang dianggap memberatkan, namun masih juga dianggap berat oleh sebagian kecil orang tua siswa dan ada pula yang tidak memberatkan.⁹⁸

Data menunjukkan bahwa untuk biaya masuk yang diistilahkan dengan amal jariyah sangat relatif. Hal ini sangat tergantung pada kemampuan ekonomi orang tua siswa. Makin tinggi tingkat ekonomi orang tua siswa, nilai lima puluh atau seratus ribu tidak berat, begitu juga sebaliknya. Karena terdapat orang tua siswa yang menyumbang melebihi standar yang telah ditetapkan besarnya sekitar satu juta. Menurut penuturan staf kebendaharaan komite, ada orang tua siswa pada tahun ini, menyumbang satu juta rupiah..

Sementara itu, untuk besaran biaya pendidikan dalam bentuk iuran pendidikan tiap bulan atau disebut dengan donatur (SPP dulu), pada MI Miftahul Huda berbeda-beda sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dan besaran biaya ini disesuaikan dengan tahun masuknya. Untuk rincian

⁹⁸ Wawancara dengan Mardiono (wali siswa) di Jati, tanggal 12 Nopember 2010.

besaran biaya pendidikan dalam bentuk donatur (SPP) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Detail Iuran Pendidikan
Siswa MI Miftahul Huda Tahun 2010/2011

Kelas	Keadaan Siswa	Besar Iuran Pendidikan	Iuran Pendidikan Perbulan	Iuran Pendidikan Pertahun
1	40	Rp. 20.000,-	Rp 800.000,-	Rp 9.600.000,-
2	38	Rp. 20.000,-	Rp 760.000,-	Rp 9.120.000,-
3	37	Rp. 20.000,-	Rp 740.000,-	Rp 8.880.000,-
4	35	Rp. 25.000,-	Rp 875.000,-	Rp 10.500.000,-
5	30	Rp. 25.000,-	Rp 750.000,-	Rp 9.000.000,-
6	32	Rp. 20.000,-	Rp 640.000,-	Rp 7.680.000,-
	Jumlah	Rp. 120.000,-	Rp 4.565.000,-	Rp 54.780.000,-

Sumber Data diolah dari RABBS MI Miftahul Huda, 2010/2011.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa untuk biaya iuran pendidikan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatannya jika dilihat dari nilai tukar rupiah tidak terlalu memberatkan. Karena tingkat kenaikannya dikisaran sekitar lima ribu rupiah.

Tabel 4.2 juga menunjukkan bahwa, dana total perolehan melalui iuran pendidikan ini untuk tiap bulannya mencapai tujuh ratus enam puluh ribu rupiah, dan untuk total per tahunnya lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah.

Untuk iuran pendidikan perbulan dalam bentuk ini, menurut kebanyakan orang tua siswa, pada prinsipnya tidak keberatan, karena MI Miftahul Huda Jati juga memberikan keringanan-keringanan berupa beasiswa bagi orang tua siswa yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan anak mereka. Untuk tahun 2010/2011 ada dua tahap subsidi yang diberikan MI Miftahul Huda kepada orang tua siswa yang kurang

mampu, yaitu baik keluarga MI Miftahul Huda ataupun non keluarga MI Miftahul Huda. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Subsidi SPP/Donatur MI Miftahul Huda Th. 2010/2011

Golongan	Jumlah Subsidi	
	Tahap I	Tahap II
Masyarakat Umum	Rp 1.000.000,-	Rp 1.500.000,-
Keluarga MI Miftahul Huda	Rp. 450.00,-	Rp. 500.000,-
Total Subsidi Tahun 2010/2011	Rp 3.450.000,-	

Sumber Data diolah dari RAPBS MI Miftahul Huda tahun 2010/2011

Kemudian selanjutnya adalah partisipasi finansial dalam bentuk amal jariyah POS. Bentuk amal jariyah POS dapat berupa iuran rutin perbulan bagi anggota POS. Amal jariyah anggota POS ini bermacam-macam sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Karena besaran iuran sesuai kesepakatan masing-masing POS, maka ada anggota POS yang hanya beramal lima ribu. Namun ada juga beramal sepuluh hingga lima belas ribu rupiah. Pada umumnya orang tua siswa merasa tidak keberatan dengan adanya amal jariyah POS secara khusus ini.⁹⁹

Partisipasi dalam bentuk ini dinilai oleh komite dan sekolah sangat strategi. Bentuk iuran model ini ternyata cukup efektif untuk menggalang partisipasi finansial. Karena hampir tidak ada orang tua siswa merasa keberatan atas pungutan ini, karena partisipasinya sesuai kesepakatan orang tua siswa.

Kemudian partisipasi finansial melalui amal Jum'at, amal Ramadhan, zakat, infaq, dan shadaqah. Bentuk partisipasi ini dilakukan melalui siswa. Partisipasi ini tidak akan jalan, jika tanpa dukungan penuh

⁹⁹Wawancara dengan Sri (wali siswa) di Jati, tanggal 10 Nopember 2010

dari orang tua siswa. Karena partisipasi dalam bentuk ini butuh pemahaman dan kesadaran. Hanya orang tua yang sadar dan peduli, serta merasakan apa yang dirasakan oleh MI Miftahul Huda yang kemudian mau mengeluarkan biaya tambahan tersebut.

Sementara untuk zakat mal dan zakat fitrah, tidak semua orang tua siswa mengeluarkan di MI Miftahul Huda. Ada orang tua siswa yang lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya sendiri.¹⁰⁰

Di samping amal Jum'ad dan amal Ramadhan, MI Miftahul Huda juga memanfaatkan momentum bulan Dzulhijjah. Momentum bulan Dzulhijjah ini, bentuk partisipasinya tidak hanya hewan kurban, tapi juga dalam bentuk uang. Partisipasi dalam bentuk hewan kurban, bagi siswa MI Miftahul Huda, pada tahun 2009/2010, berhasil mengumpulkan 6 hewan kurban dan dalam bentuk uang sejumlah sembilan Tiga Juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah. Hewan kurban yang didapatkan ini kemudian dibagikan kepada masyarakat desa Jati oleh siswa, guru, dan orang tua siswa.¹⁰¹

Bentuk-bentuk berpartisipasi dengan menggunakan pendekatan ini, ternyata cukup strategis dan juga dinilai efektif, karena terbukti mampu mengumpulkan uang jutaan rupiah.¹⁰²

Selanjutnya partisipasi dalam bentuk barang, finansial melalui berbelanja di koperasi. Untuk mendapat partisipasi orang tua siswa yang

¹⁰⁰ Wawancara dengan Santi (wali siswa) di Jati, 12 Nopember 2010

¹⁰¹ Dokumentasi MI Miftahul Huda, 2010

¹⁰² Wawancara dengan Suhari (humas) di Jati, tanggal 15 Nopember 2010

lebih luas, pihak komite dan madrasah mendirikan koperasi siswa. Bentuknya berupa penyediaan barang untuk keperluan siswa.

Dengan adanya koperasi dalam bentuk barang, diharapkan orang tua siswa, siswa, guru, karyawan dan tamu MI Miftahul Huda, dapat berbelanja pada koperasi tersebut. Sehingga secara tidak langsung akan memberikan partisipasi terhadap sekolah. Menurut Nurul Laila, staf koperasi, menyebutkan bahwa omset rata-rata perbulan sekitar 1 juta rupiah, dengan keuntungan 15 persen.

Dengan adanya koperasi siswa, secara tidak langsung orang tua siswa berpartisipasi aktif terhadap sekolah dalam bentuk uang. Karena dengan adanya dana siswa pada koperasi tersebut, sekolah akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus, yaitu sekolah dapat menggunakan dana tersebut jika sekolah mengalami defisit anggaran.

Dari berbagai uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa peran partisipasi masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap pengelolaan sekolah.

Peran partisipasi orang tua siswa terhadap pengelolaan sekolah ini, juga dialami oleh kepala madrasah sebelumnya yaitu Suhadji. Dari disiplin diri kepala sekolah, akhirnya melahirkan murid berprestasi, dari prestasi inilah kemudian melahirkan kepercayaan masyarakat.¹⁰³

Jadi, mengenai biaya pendidikan yang ditarik sekolah dan komite, dalam rangka menunjang proses belajar mengajar, menurut penuturan

¹⁰³ Dokumentasi MI Miftahul Huda, 2010

orang tua siswa tidak keberatan. Namun mereka menaruh harapan besar pada sekolah agar lebih ditingkatkan profesionalisme dalam proses belajar mengajar. Biaya besar yang dikeluarkan diharapkan seiring dengan kualitas mutu out putnya.¹⁰⁴ Adapun bentuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Bentuk Partisipasi Masyarakat

No	Partisipasi	Keterangan
1	Pendaftaran	5 ribu,x 40 siswa
2	Iuran Pendidikan	Rp54.780.000,-
3	Amal Jariah Siswa Baru	50 ribu x siswa baru
4	Amal Jum'at	Rp 2.230.000,-
5	Usaha Finansial	750.000,-
6	Infaq Siswa, Guru, Karyawan	600.000,-
7	Dana POS	Amal Jariah POS
8	Dana kegiatan lain-lain	Sumbangan Sukurela
9	Partisipasi	Bangku, Buku, Jasa dan lainnya

Sumber Data diolah dari RABSI MUM Miftahul Huda tahun 2010/2011

Masih dalam bentuk-bentuk partisipasi orang tua siswa berupa dana dan jenis-jenis lainnya, komite madrasah juga telah melakukan upaya-upaya penyadaran dan langkah-langkah strategis untuk mendapatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Untuk mendukung kebijakan sekolah yang bermutu itu, komite mengajak bersama-sama orang tua murid yang terhimpun dalam satu organisasi namanya POS untuk memikirkan bersama. Sehingga solusinya sekarang itu bagaimana mencari dana untuk membiayai guru-guru tidak tetap itu. Yaitu melalui

¹⁰⁴ Wawancara dengan Aminah (wali siswa) di Jati, tanggal 15 Nopember 2010

sumbangan sukarela, walaupun nama "sukarela" sumbangan yang sifatnya memberi kesadaran kepada orang tua.¹⁰⁵

Ketiga, partisipasi dalam bentuk sumbangsi pemikiran, saran, dan kritik. Partisipasi orang tua siswa, dalam bentuk ini, disalurkan melalui POS. Ada juga orang tua siswa secara langsung menyampaikan keluhan dan masukan kepada Kepala Madrasah. Namun ada juga langsung kepada guru wali masing-masing.

Sementara untuk KS/M, orang tua siswa jarang melakukan komunikasi, kecuali perwakilannya. Karena menurut penuturan orang tua siswa, bertemu dengan komite itu hanya satu tahun sekali. Sehingga jarang orang tua siswa menyalurkan aspirasinya melalui komite.¹⁰⁶

2. Lembaga KS/M dan Bentuk Partisipasinya

Ada empat fungsi KS/M sesuai amanah konstitusi yaitu: (1) memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. *Kedua*, pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (3) pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan haluan pendidikan di satuan pendidikan. (4) mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

¹⁰⁵ Wawancara dengan H. Musiri (komite madrasah) di Jati, tanggal 22 Nopember 2010

¹⁰⁶ Wawancara dengan Anis (wali siswa) di Jati, tanggal 15 Nopember 2010

Peran dan fungsi KS/M sebagaimana amanah konstitusi UU Sisdiknas No.20/2003 tampaknya terlambat penerapannya di MI Miftahul Huda. Pada era awal peran BP3 sudah melampaui peran KS/M.

Ini adalah wujud nyata, partisipasi yang dilakukan oleh Abdul Latif. Ia sangat kritis, ulet, dan gigih untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap sekolah. Musiri telah memberikan contoh. Ia telah menjalankan fungsi-fungsi lembaga partisipasi yang dibentuk pemerintah belakangan, yaitu KS/M. Ia sangat peduli dengan lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam.¹⁰⁷

Peran partisipasi masyarakat terhadap sekolah sangat besar pengaruhnya terhadap pengelolaan sekolah, terutama pada penerapan konsep MBS dewasa ini. Keberhasilan MI Miftahul Huda ini tidak lepas dari peran BP3 yang secara terus menerus memacu para murid maupun guru-gurunya untuk terus menunjukkan prestasi dengan ditunjang keikhlasan dan kejujuran. Pihak BP3 dengan sekolah sudah menyatu. Berbagai sarana prasaran berupa 6 lokal belajar, satu Mushollah, ruang UKS, taman sekolah, ruang bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan laboratorium komputer serta honor guru yang mencapai Rp. 3.500.000,- itu semuanya diperoleh dari sumbangan orang tua murid melalui BP3.¹⁰⁸ b

Untuk akuntabilitas, transparansi, dan demokratisasi (M zuhrofuddin) telah meletakkan dasar-dasar dan sistem pada MI Miftahul

¹⁰⁷ Dokumen MI Miftahul Huda, 2010

¹⁰⁸ *Ibid.*

Huda. Ada dua hal yang dibangun yaitu sistem nilai dan sistem manajemen.¹⁰⁹

Lain halnya dengan Musiri. Patut diberikan penghargaan yang besar kepadanya. Seorang yang memiliki kesibukan diberbagai tempat, namun mau bergabung dengan MI Miftahul Huda. Apa motivasi yang mendorong seorang ini, mau bergabung dengan MI Miftahul Huda? Apakah terdorong oleh aspek materi, ataukah ada aspek lain yang dapat mempengaruhinya?

Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut di atas, dapat dilihat dari bentuk-bentuk partisipasi yang telah diberikan terhadap MI Miftahul Huda. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh komite periode Musiri adalah lebih fokus pada masalah, untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan citra komite.¹¹⁰

Bentuk partisipasi ini, lebih difokuskan pada aspek pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Sistem ini diteruskan oleh generasi penerusnya hingga Suhaji. Sistem ini kemudian menjadi tradisi di MI Miftahul Huda. Budaya organisasi dan warga sekolah sesuai dengan nilai-nilai Islam ini kemudian menjadi semangat kepala madrasah yang terakhir ini.

3. Partisipasi Alumni

Partisipasi alumni MI Miftahul Huda, terhadap almamaternya dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi memberikan

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Wawancara dengan H Musiri (Komite Madrasah) di Jati, tanggal 22 Nopember 2010

support pikiran, saran, dan kritik terhadap almanaternya dan partisipasi dalam bentuk finansial. Partisipasi dalam bentuk *support* atau dukungan pikiran, saran, dan kritik.¹¹¹

Partisipasi alumni dalam bentuk materi atau finansial juga menjadi bagian yang penting. Pentingnya peran alumni sebagai bagian dari partisipan, tidak lepas dari peran dan strategi komite dan madrasah untuk menyadarkan dan mendorong alumni sebagai partisipan atau donatur tetap MI Miftahul Huda.¹¹²

4. Humas dan Bentuk Partisipasinya

Wujud nyata partisipasi masyarakat luas melalui *public relation* (Humas) adalah: (1) menjalin kerja sama dengan pihak lain seperti, Organisasi keagamaan (2) memberikan informasi kepada pihak lain, (3) mendata dan mengakomodasi kunjungan tamu penelitian dan magang, (4) memelihara hubungan baik dengan lintas sektoral, dan (5) membangun dan membina komunikasi yang harmonis dengan paguyuban orang tua siswa dan masyarakat sekitar sekolah.

B. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat

Secara naluri atau manusiawi, setiap orang tua siswa berpartisipasi menyekolahkan anaknya di MI Miftahul Huda, tentunya didorong oleh motivasi-motivasi atau kecenderungan-kecenderungan kemanusiaan. Kecenderungan orang tua siswa tersebut dilandasi oleh keinginan-keinginan pemenuhan kebutuhan atas dirinya dan terutama anaknya di masa mendatang.

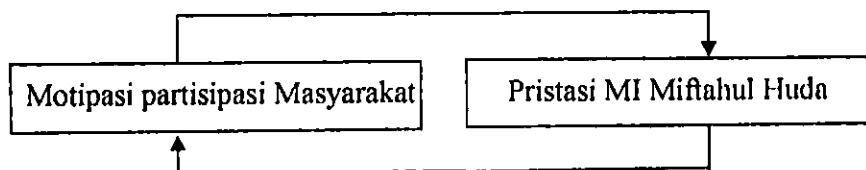
¹¹¹ Wawancara dengan Sama'in (Alumni) di Jati, tanggal 21 Nopember 2010

¹¹² Dokumen MI Miftahul Huda, 2010

Pemenuhan kebutuhan itu baik berupa biologis-fisiologis maupun *spiritual-rūhiyah*. Secara biologis-fisiologis orang tua ingin anaknya cerdas, di masa mendatang anak tersebut bisa mandiri, berkedudukan atau lainnya. Secara *spiritual-rūhiyah*, orang tua merasa tenang karena anaknya beribadah dan mengaji dengan baik, sehingga kedepan ia tidak terpengaruh penyakit masyarakat dan bentuk lainnya. Faktor pemenuhan atas diri (*self-fulfillment*) ini, seperti yang digunakan dalam teorinya Maslow.

Untuk mendapatkan partisipasi masyarakat, MI Miftahul Huda juga memiliki motivasi-motivasi. Motivasi MI Miftahul Huda berjalan seiring dengan motivasi partisipasi masyarakat. Jika MI Miftahul Huda meniscayakan partisipasi masyarakat tinggi, maka MI Miftahul Huda harus memahami elemen motivasi apa saja yang dimiliki masyarakat terhadap sekolah. Dari sini dapat dikatakan bahwa hubungan partisipasi masyarakat terhadap sekolah terjadi secara timbal balik.

Hubungan ini oleh Armstrong sebagai hubungan yang positif. Dalam pengertian bahwa meningkatnya motivasi akan menghasilkan produktivitas, kinerja, dan prestasi kerja yang lebih baik. Bentuk hubungannya adalah hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



GAMBAR 4.1

HUBUNGAN MOTIVASI DAN PRESTASI SEKOLAH

Untuk itu, MI Miftahul Huda berupaya optimal, efektif, dan efisien mungkin untuk bekerja dengan prinsip tiga as, yaitu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas sesuai dengan visi-misi yang telah dirumuskannya agar mendapatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar.

Dari data yang diperoleh, peneliti merumuskan dalam beberapa poin tentang motivasi-motivasi yang mendorong orang tua siswa dan masyarakat luas berpartisipasi terhadap MI Miftahul Huda. Dan motivasi ini juga merupakan, bentuk-bentuk upaya, di sisi yang lain, yang dilakukan oleh pihak badan partisipasi masyarakat dan satuan pendidikan, untuk mendapatkan partisipasi dari masyarakat luas. Diantara upaya-upaya yang dilakukan oleh badan partisipasi masyarakat dan pihak satuan pendidikan untuk memotivasi partisipasi masyarakat terhadap MI Miftahul Huda adalah sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis Islam dan Keunggulan Plus

Motivasi Partisipasi Masyarakat Prestasi MI Miftahul Huda Berbagai upaya yang telah dilakukan, oleh pihak komite dan madrasah untuk meningkatkan mutu madrasah dengan memiliki keunggulan plus, tidak lain adalah upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat. Dan juga, merupakan upaya untuk menjawab motivasi masyarakat, yang menyekolahkan anaknya karena alasan keunggulan plus. Keunggulan plus yang dimaksud adalah sekolah yang memiliki mutu sebagaimana sekolah-sekolah lain pada umumnya, tapi juga memiliki nilai lebih. Nilai lebih yang dimaksud adalah nilai Islam sebagai landasan filosofis gerakan pada MI Miftahul Huda.

Dan hasil temuan menunjukkan hal tersebut diatas. Bahwa MI Miftahul Huda, memiliki keunggulan kompetitif di bidang sains atau masyarakat menyebutnya dengan ilmu pengetahuan umum dan MI Miftahul Huda juga terbukti mampu membentuk dan menciptakan generasi Qur'ani. Generasi Qur'ani adalah generasi yang tidak dikotomis antara ilmu umum dan ilmu agama. Penggunaan istilah ilmu umum sebenarnya hanya menunjukkan bahwa ilmu yang bersifat kognitif-rasional, sementara ilmu agama lebih bersifat kognitif-rūhiyah atau spiritualitas. Aspek rūhiyah-spiritual ini oleh Maslow disebut motivasi sosial. Penajaman aspek ini akan melahirkan sensitivitas sosial (kepekaan sosial) yang pada gilirannya membentuk budaya cinta, kasih sayang dan diterima sebagai anggota kelompok sosial. Karena prinsip dasar individu sebagai manusia adalah makhluk sosial. Dengan kesadaran akan diri sebagai makhluk sosial, maka masyarakat secara sadar pula berpartisipasi terhadap sekolah karena tanggung jawab sosialnya.¹¹³

Faktor kualitas dan faktor agama menjadi daya tarik tersendiri bagi orang tua siswa yang terutama tidak memiliki waktu yang luang untuk mengontrol pendidikan anak di rumah, serta keterbatasan pemahaman keagamaan orang tua siswa. Dari berbagai temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar motivasi orang tua siswa berpartisipasi menyekolahkan anaknya di MI Miftahul Huda adalah terdorong oleh faktor agama. Meskipun sikap dan mental keberagamaan

¹¹³ Wawancara dengan Romlan (wali siswa) di Jati, tanggal 22 Nopember 2010

peserta didik yang terbentuk di MI Miftahul Huda tidak sebesar di pondok pesantren, namun orang tua siswa tetap meyakini bahwa faktor agama menjadi obat mujarab di samping faktor kualitas.¹¹⁴

Hasil temuan menunjukkan bahwa faktor agama menjadi peran kedua tapi menentukan mendorong partisipasi orang tua siswa terhadap MI Miftahul Huda. Jika pada sekolah lain yang memiliki tingkat kualitas sama dengan MI Miftahul Huda atau sedikit di atas MI Miftahul Huda, maka masyarakat masih memilih MI Miftahul Huda sebagai alternatif karena pada sekolah lain dinilai oleh orang tua siswa sebagai sekolah yang bukan berbasis agama.¹¹⁵

2. Kompetitif dan Kualitas Proses yang Baik

Untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap sekolah, MI Miftahul Huda telah melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh MI Miftahul Huda ini adalah untuk mencapai mutu kompetitif. Mutu kompetitif yang dimaksud adalah sekolah yang memiliki mutu setara atau memiliki mutu lebih baik dari sekolah-sekolah lainnya, baik di Indonesia atau pun secara khusus di kabupaten Trenggalek. Pentingnya mutu ini kemudian dicantumkan dalam visi MI Miftahul Huda, yaitu mewujudkan madrasah yang handal, Madrasah yang handal adalah madrasah yang memiliki keseimbangan antara kualitas in put, proses, out put, dan out come kompetitif dan sejajar dengan sekolah lain atau memiliki kualitas unggul. MI Miftahul Huda ke depan diharapkan dapat disejajarkan,

¹¹⁴ Wawancara dengan Siti (wali siswa) di Jati, tanggal 11 Nopember 2010

¹¹⁵ Wawancara dengan Endang (wali siswa) di Jati, 12 Nopember 2010

sederajat atau bahkan melebihi sekolah-sekolah unggul lainnya di tanah air. Keunggulan MI Miftahul Huda tidak hanya siswanya mampu berkompetisi untuk masuk di sekolah-sekolah unggul di atasnya, tapi juga MI Miftahul Huda meniscayakan keunggulan guru-guru, fasilitas, pelayanan, dan sarana prasarana lainnya yang terbaik untuk masyarakat.¹¹⁶

Madrasah yang kompetitif ini diwujudkan melalui kualitas *out put* dan *out come* peserta didiknya. Kualitas *out put* dapat dilihat pada prestasi akademik dan non akademik. Untuk memajukan pendidikan nasional, pemerintah menetapkan standar kompetensi lulusan untuk seluruh mata pelajaran. Standar kelulusan, MI Miftahul Huda telah melampaui standar yang ditetapkan pemerintah pada setiap periode kelulusannya. Pada tahun 2007/2008 nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran sebesar 7,53, pada tahun 2008/2009 nilai rata-rata 7,67, dan tahun 2009/2010 nilai rata-ratanya 7,83. Sementara untuk dapat melanjutkan pendidikan lebih lanjut MI Miftahul Huda 100% terserap keseluruhan sekolah unggul di Trenggalek Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 4.5 Prestasi Akademik

Mata Pelajaran	2007/2008	2008/2009	2009/2010
PKN	8,23	8,20	8,44
B. Indonesia	7,30	7,40	7,21
Matematika	7,21	6,60	7,23
IPA	7,14	7,02	7,96
IPS	7,03	8,13	7,75
Qur'an Hadits	8,00	8,23	8,29
Aqida Akhlak	8,14	8,40	8,50
Fiqih	8,25	8,15	8,00
SKI	7,12	7,30	8,00

¹¹⁶ Profil MI Miftahul Huda, 2010

B.Arab	6,90	7,25	6,95
Nilai Rata-Rata	7,53	7,67	7,83

Sumber Data: Diolah dari Profile MI Miftahul Huda, 2010

Data ini menunjukkan bahwa prestasi akademik siswa MI Miftahul Huda, setiap tahunnya meningkat dan sangat baik dan kompetitif dengan sekolah lainnya di Trenggalek.

Tabel menunjukkan bahwa, pada tahun ajaran 2007/2008, nilai rata-rata untuk seluruh mata pelajaran mencapai angka 7,53, untuk tahun ajaran 2008/2009 nilai rata-rata mencapai 7,67, dan untuk tahun ajaran 2009/2010, nilai rata-rata mencapai 7,83. Jika pada sekolah umum misalnya, memiliki angka rata-rata siswa untuk seluruh mata pelajaran sama dengan MI Miftahul Huda, atau pun diatas MI Miftahul Huda, itu masih dianggap bahwa MI Miftahul Huda lebih tinggi nilai prestasinya.

Hal ini dapat dilihat dari beban belajar dan sebaran mata pelajaran yang ada di MI Miftahul Huda. Jika di SD hanya memuat 10 mata pelajaran umum, sementara di MI Miftahul Huda terdapat tambahan 7 pelajaran. Data dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Sebaran Mata Pelajaran

No	Mata Pelajaran	Kelas						Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	
1	Qur'an Hadits	2	2	2	2	2	2	12
2	Aqidah Akhlak	2	2	2	2	2	2	12
3	Fiqih	2	2	2	2	2	2	12
4	SKI	2	2	2	2	2	2	12
5	B.Arab	-	-	-	2	2	2	6
6	B. Indonesia	6	6	6	6	6	6	36
7	Matematika	6	6	6	6	6	6	36
8	IPA	3	3	3	4	4	4	21
9	PKN	2	2	2	2	2	2	12
10	IPS	3	3	3	4	4	4	21

11	Penjaskes	2	2	2	2	2	2	12
12	Senbudker	2	2	2	2	2	2	12
13	Komputer	-	-	-	1	1	1	3
14	Bahasa Jawa	2	2	2	2	2	2	12
16	Bhs. Inggris	-	-	-	2	2	2	6
17	Qiro'ah/Sholat	-	-	-	1	1	1	3
18	PBM	2	2	2	2	2	2	12
Jumlah		36	36	36	42	42	42	234

Sumber Data diolah dari Profile MI Miftahul Huda, 2010.

Dan untuk kualitas out putnya dapat dilihat daya serap peserta didik diterima di sekolah unggul setingkat di atasnya. Lulusan MI Miftahul Huda semuanya terserap pada sekolah-sekolah unggul di kabupaten Trenggalek baik di MTs.N Model Trenggalek, SMP Negeri 1 Trenggalek, SMP Negeri 1 Karanganyar atau pun lainnya.¹¹⁷

Pilihan orang tua siswa untuk berpartisipasi menyekolahkan anaknya di MI Miftahul Huda tidak hanya dilihat aspek luarnya saja. Tapi juga dilihat dari aspek yang lebih substantif yaitu aspek kualitas prosesnya.¹¹⁸

Fasilitas dan Letak yang Strategis Untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi terhadap MI Miftahul Huda, berbagai upaya pun telah dilakukan. Aspek yang tidak kalah pentingnya dengan aspek-aspek yang lainnya adalah aspek fasilitas dan letak yang strategis. Tidak semua orang tua siswa, memang memasukkan anaknya dengan melihat aspek ini. Namun aspek ini menjadi penting khususnya bagi orang tua siswa yang memiliki tingkat kesibukan dengan melihat

¹¹⁷ Wawancara dengan NN (wali murid) di Jati , tanggal 12 Nopember 2010

¹¹⁸ Wawancara dengan Anis (wali siswa) di Jati , tanggal 15 Nopember 2010

aspek ini. Namun aspek ini menjadi penting khususnya bagi orang tua siswa yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi.¹¹⁹

Di samping itu juga, sarana prasarana menjadi fenomena menarik. Dimana ada beberapa orang tua siswa yang mengakui bahwa sebelum memasukkan anaknya di MI Miftahul Huda, mereka bersama anak-anaknya yang akan sekolah untuk melihat fasilitas belajar dan mendaftarkan anaknya di setiap sekolah favorit lainnya di Trenggalek. Namun ketika mendaftarkan diri di MI Miftahul Huda dan diterima, anaknya lebih memilih di MI Miftahul Huda ketimbang sekolah favorit lainnya meskipun ada orang tua yang sudah membayar 100 ribu sampai 1 500 rupiah di tempat yang lain. Dan orang tua bijak merelakan pilihan anaknya menjadi pilihannya juga. Setelah ditelusuri ternyata faktor pendorong bagi anak memilih sendiri adalah fasilitas (perpustakaan yang dipenuhi dengan buku-buku yang memikat anak, sarana mainan usia anak, sarana olahraga, dan lainnya).

Pandangan orang tua siswa tentang sarana dan prasarana di MI Miftahul Huda dewasa ini tampaknya tidak terlalu berlebihan. Anggapan ini tidak hanya datang dari orang tua siswa dan masyarakat desa Jati saja, tapi juga dari desa- desa lain dikecamatan Karanganyar.

Sarana lain yang berpotensi mendorong partisipasi orang tua menyekolahkan anaknya adalah sarana pelayanan kesehatan pada anak. Pada unit kesehatan sekolah (UKS) misalnya, terdapat peralatan yang

¹¹⁹ Wawancara dengan H Musoyo (mantan Kepala SD) di Jati, 15 Nopember 2010

memadai (obat-obatan). Karena dengan bersekolah di MI Miftahul Huda, orang tua siswa, tidak mengkhawatirkan lagi terhadap anaknya, apabila mengalami sakit atau musibah di sekolah. Bagi orang tua siswa, yang ekonominya masih menengah ke bawah, barangkali tidak begitu penting. Akan tetapi bagi orang tua siswa yang ekonominya menengah ke atas, persoalan kesehatan anaknya menjadi sesuatu hal yang prioritas.

Di samping aspek sarana dan prasarana, aspek lain yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi adalah aspek letak yang strategis. Aspek ini menjadi salah satu faktor pendorong utama bagi masyarakat berpartisipasi untuk menyekolahkan anaknya di MI Miftahul Huda, khususnya orang tua siswa yang tempat kerja dan lokasi rumahnya tidak jauh dari daerah sekitar MI Miftahul Huda. Terutama guru, dan pegawai kantor disekitar MI Miftahul Huda. Bagi orang tua siswa yang berprofesi sebagai guru, jumlahnya sekitar 2 %. Hampir semuanya sebagai guru. Begitu juga bagi pegawai swasta 4 % dan petani 94 %.

Hasil temuan tentang motivasi orang tua siswa terutama orang tua siswa sebagai guru dan karyawan di sekitar MI Miftahul Huda menyatakan bahwa faktor lain setelah kualitas dan agama adalah letak yang strategis.

3. Terbukti Disiplin dan Mandiri

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat terhadap MI Miftahul Huda, salah satu upaya yang dilakukan komite dan sekolah adalah menerapkan kedisiplinan pada sekolah Kedisiplinan MI Miftahul Huda

tidak hanya ditunjukkan oleh guru dan karyawannya, tapi juga ditunjukkan oleh kepala madrasah dan siswanya.

Kedisiplinan dan melati kemandirian siswa, merupakan tradisi sekolah yang diwariskan Suhadji. Hingga kini, tradisi tersebut diikuti oleh M. Zuhrofuddin. Tradisi hadir lebih awal untuk memnyambut dan memberi salam kepada karyawan dan peserta didik merupakan perwujudan dari pelayanan prima dan bentuk kedisiplinan yang ingin diterapkan di MI Miftahul Huda.

Dengan hadirnya kepala madrasah di awal waktu secara psikologis mendorong siswa, guru, dan pegawai untuk hadir lebih tepat waktu. Tridisi ini jika diulang-ulang setiap harinya maka akan melahirkan sikap mental pada siswa, guru, dan pegawai. Dampak dari perwujudan ini akan melahirkan budaya sekolah yang disiplin. Jika seorang peserta didik menerapkan sikap ini di rumahnya, maka orang tua kemudian merasakan manfaat kedisiplinan disekolah terhadap anaknya.

Hasil temuan menunjukkan hal yang sama, bahwa sebagian beam orang tua siswa merasakan manfaat dari kemandirian dan kedisiplinan anaknya ketika di rumah.¹²⁰

C. Pola Kerja Partisipasi Masyarakat

Keberadaan lembaga partisipasi masyarakat mulai dari Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), Paguyuban Orang Tua Siswa (POS) dan KS/M bagi MI

¹²⁰ Wawancara dengan Endang dan Anonim (wali siswa) di Jati, tanggal 12 Nopember 2010

Miftahul Huda sangat diharapkan eksistensinya. Sebagai lembaga pilar MBS, secara konstitusional KS/M diberi wewenang dengan memiliki empat tujuan pokok untuk bersama sekolah meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Badan yang memiliki fungsi sosial yang mendorong dan menumbuhkan kesadaran, kepedulian, kepekaan, menggalang dana masyarakat untuk berpartisipasi terhadap sekolah merupakan konsep keberadaan madrasah itu sendiri. Karena kelahiran madrasah adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Fakta menunjukkan bahwa kelahiran madrasah, secara umum merupakan hasil partisipasi masyarakat secara swadaya dan swadana.

1. Optimalisasi Fungsi dan Peran Lembaga Partisipasi

Keberadaan partisipasi masyarakat dalam pendidikan Islam muncul seiring dengan kehadiran Islam itu sendiri di Indonesia. Masyarakat secara sadar bahu membahu mendirikan madrasah, sehingga keberadaan lembaga partisipasi masyarakat dianggap perlu dan penting.¹²¹

Sejarah panjang MI Miftahul Huda telah membuktikan bahwa eksistensi MI Miftahul Huda sebagaimana tampak sekarang, tidak lepas dari dukungan masyarakat luas, orang tua siswa yang tergabung dalam BP3 POS dan KS/M. Bahwa seefektif dan seefisien apapun kepemimpinan kepala madrasah, jika tanpa dukungan atau partisipasi masyarakat luas maka wajah MI Miftahul Huda tidak seperti apa yang tampak sekarang.¹²²

¹²¹ Profil MI Miftahul Huda, 2010

¹²² Ibid.

Sementara untuk keberadaan lembaga KS/M sekarang perannya tidak terlalu besar. Hal ini dapat difahami, mengingat bangunan dasar badan partisipasi masyarakat telah diletakkan oleh pendahulunya. Dan sistem ini di MI Miftahul Huda sudah berjalan secara normal. Sehingga keberadaan lembaga partisipasi masyarakat dalam bentuk KS/M dewasa ini lebih pada menjalankan tugas-tugas sebelumnya dan menjaga citra serta mempertahankan agar MI Miftahul Huda ini tetap eksis, kalau bisa lebih unggul lagi, yaitu bertaraf nasional.

Keberadaan lembaga partisipasi masyarakat ini juga dapat dilihat dari MI Miftahul Huda pada manajemen pengelolaan madrasah dengan menerapkan konsep MBS. Wujud dari konsep MBS adalah adanya lembaga partisipasi masyarakat di MI Miftahul Huda yang berjalan secara efektif sesuai fungsi dan tugasnya. Di samping partisipasi melalui KS/M, MI Miftahul Huda juga menggalang komunikasi partisipasi melalui POS dan jaringan alumni. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas terhadap sekolah.

Indikator bahwa lembaga ini masih efektif ditunjukkan dengan partisipasi orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya di tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Perkembangan partisipasi masyarakat menyekolahkan anaknya tiga tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.7 Partisipasi Siswa

Kelas	2008/2009			2009/2010			2010/2011		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
I	22	15	37	16	22	38	21	19	40
II	12	23	35	22	15	37	16	22	38

III	16	14	30	12	23	35	22	15	37
IV	17	15	32	16	14	30	12	23	35
V	10	23	33	17	15	32	16	14	30
VI	16	14	30	10	23	33	17	15	32
Jml	93	104	197	93	112	205	104	108	212

Sumber Data: Diolah dari Profile MI Miftahul Huda, 2010

2. Kepemimpinan Visioner, Ikhlas dan Beretos

Untuk mendapatkan partisipasi masyarakat luas, faktor penentunya adalah *leadership* (kepemimpinan). Pemimpin adalah lokus utama sebagai penggerak, pendorong, penuntun, dan uswah (ditiru). Muhammad Yusak dan Suhadji telah membuka jalan bagi kita semua khususnya masyarakat muslim dalam mengelola madrasah. Dua pemimpin beretos tinggi, bekerja keras, dan beramal ikhlas.¹²³

Menurut Suyono fisik bangunan bukan jaminan, yang penting disiplin diciptakan dulu. Kita tidak bisa memaksa masyarakat untuk memasukkannya ke MTs. Kita minta dulu buktinya. Bukti itu dapat dilihat dari disiplin pelaksanaan proses belajar mengajar. Masuk dan pulang jam berapa. Apakah banyak jam kosong atau tidak. Kualitas lulusannya bagaimana dan seterusnya. Kita tidak dapat meminta begitu saja orang tua untuk memasukkan anak-anaknya yang lulus MI Miftahul Huda ke MTs. Ini bukan zamannya main paksa melainkan memberi kesempatan orang untuk memilih yang terbaik.

3. Berpartisipasi Itu Ibadah dan Meningkatkan Ukhwa

Kenapa BP3, begitu gigih dalam membina MI Miftahul Huda, tidak lain karena ingin memiliki sebuah madrasah yang mempunyai

¹²³ Dokumentasi MI Miftahul Huda, 2010

kualitas baik. Sebab madrasah ini adalah merupakan awal yang baik sebagai media untuk membina anak-anak, meskipun kini sudah ada media lain yang lebih dini yaitu TK al-Qur'an. Hal ini tentu akan memberikan bekal yang cukup baik untuk kelangsungan pendidikan anak-anak kita di masa mendatang. Obsesi kami sebenarnya adalah untuk mengangkat madrasah agar sejajar dengan sekolah setingkat yang lain, yang selama ini dianggap lebih memiliki keunggulan dibanding madrasah. Insya Allah apa yang dilakukan sudah mendekati apa yang kami inginkan.

Sama halnya dengan ketua komite, Musiri, saya tekankan kepada seluruh anggota saya untuk tidak menerima gaji dari komite, bahkan saya haramkan untuk menerimanya, meskipun peraturan atau UU membolehkan, pengurus komite mendapatkan 15% uang dari partisipasi siswa. Kami aktif di komite itu pengabdian, hal ini saya ingin tiru dewan kota di Amerika Serikat. Dia tidak pernah menerima gaji, bekerja baginya hanya pengabdian kepada masyarakat.

Komite juga selalu memberikan pemahaman dan penyadaran terhadap orang tua siswa bahwa pentingnya partisipasi pendidikan yang tinggi terhadap MI Miftahul Huda. Dan orang tua siswa menyadari hal itu, bahwa pendidikan bagus, harganya juga harus bagus, hanya satu dua yang kadang-kadang kurang setuju. Tapi secara mayoritas orang tua siswa menyadari akan hal itu. Bahwa biaya pendidikan tinggi ini bagian dari ibadah kita. Karena yang kita biyai adalah guru-guru dan karyawan yang belum jelas nasibnya. Kalau guru PNS, ya, sudah cukup mendapatkan gaji,

tapi kalau guru dan pegawai tidak tetap siapa yang bayar mereka. Mereka juga belum mampu, masih pas-pasan. Untuk itu, komite sekolah selalu membangun partisipasi dengan berbagai pendekatan.

Pendekatan dan strategi lain yang digunakan oleh komite dan sekolah, untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap sekolah adalah menjalin ukhwa. Islam telah mengajarkan kepada kita tentang konsep ukhwa. Membangun ukhwa dengan memperbanyak silaturahmi. Karena silaturahmi memunculkan kebersamaan.

Dua figur M Zuhrofudin dan Musiri satu visi dan misi (*dwi tunggal*) mampu menghantar MI Miftahul Huda sebagaimana yang kita saksikan dewasa ini. Keduanya tidak segan-segan dan malu-malu bersama-sama mendatangi rumah rumah orang tua siswa untuk mendapatkan dukungan. Konsep silaturahmi diterapkan olehnya ini untuk membesarkan MI Miftahul Huda.

Bentuk silaturahmi ini pun dijadikan tradisi hingga sekarang. Berbagai kegiatan yang menunjang proses belajar mengajar, MI Miftahul Huda selalu membangun komunikasi dengan orang tua siswa lewat lembaga partisipasi orang tua siswa yang disebut dengan POS. POS dilalui oleh orang tua siswa dan satuan pendidikan memiliki peran yang sangat strategis. POS oleh MI Miftahul Huda dianggap sebagai satu keluarga besar yang tidak terpisahkan. Ia bagai dua sisi mata uang. Jika hilang sebelahny maka tidak bernilai. Sehingga berbagai momen hari-hari besar

nasional dan keagamaan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjalin silaturahmi untuk kebersamaan.

4. Bangun Kemitraan dengan Keterbukaan dan Disiplin

Banyak faktor yang mendorong orang tua siswa berpartisipasi secara aktif pada saat itu, tapi faktor yang paling sensitif dan utama adalah kepercayaan (amanah). Berbagai penelitian dewasa ini membuktikan bahwa masyarakat muslim yang ingin mengeluarkan zakat fitrah misalnya, khususnya di perkotaan yang tingkat pemahaman dan kesadran agamanya tinggi lebih cenderung mengeluarkan langsung kepada orang yang layak menerima, orang tidak lagi percaya pada lembaga BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah). Hal senada juga disampaikan oleh sebagian orang tua siswa, yang enggan mengeluarkan zakatnya di madrasah, karena mereka ingin membaginya secara langsung kepada orang yang betul-betul berhak menerimanya.

Faktor kepercayaan (amanah) inilah modal utama yang dimiliki kepemimpinannya ini untuk menggalang partisipasi masyarakat terhadap MI Miftahul Huda. Indikatornya dapat dilihat dari pemanfaatan sumber dana partisipasi masyarakat. Partisipasi finansial masyarakat pada saat itu betul-betul fungsional tepat guna dan tepat sasaran. Dana partisipasi masyarakat digunakan sepenuhnya untuk peningkatan mutu pendidikan MI Miftahul Huda. Baik untuk biaya operasional sekolah, kesejahteraan guru dan pegawai, maupun fasilitas-fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar. Open manajemen atau akuntabiliti pengelolaan

keuangan dari masyarakat inilah kemudian membuat masyarakat atau orang tua siswa semakin percaya untuk berpartisipasi lebih besar lagi terhadap madrasah. Tradisi akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan tetap dipertahankan hingga sekarang.

Untuk akuntabilitas, transparansi, dan demokratisasi ini oleh Suhadji telah meletakkan dasar-dasar dan sistem pada MI Miftahul Huda. Ada dua hal yang dibangun yaitu sistem nilai dan sistem manajemen.¹²⁴

Tampaknya sistem ini diteruskan oleh generasi penerusnya hingga kepemimpinan M. Zuhrofuddin. Sistem ini kemudian menjadi tradisi di MI Miftahul Huda. Budaya organisasi dan warga sekolah sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam al-Quran dan Sunah Rasul, kemudian menjadi semangat M. Zuhrofuddin.

Sementara itu, untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan demokratisasi pengelolaan keuangan, Musiri menempatkan orang yang ahli dalam bidangnya dan kaya, pada posisi bendahara. Langkah ini diambil menurut ketua komite agar menjaga citra negatatif komite. Posisi ini dipegang oleh Didiet Afandi, dia Akuntan publik, kaya, dan dosen Brawijaya sebagai bendahara komite. Hal ini tidak lain dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap komite.

Banyak komite diserang karena mengambil uang partisipasi siswa dan asal menaikan biaya ataupun pungutan-pungutan tanpa adanya pemahaman dan penyadaran terlebih dahulu. Inilah kita hindari dan kita

¹²⁴ Dokumentasi MI Miftahul Huda, 2010

jaga di komite. Jadi masalah pengelolaan keuangan di komite tidak ada lagi masalah buat komite, karena semuanya terbuka untuk siapa saja bisa mengaksesnya atau dapat lihat di sana.

Di samping itu, aspek lain yang menjadi strategi gerakan untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi adalah faktor ketekunan, keuletan, dan kedisiplinan para penggerak partisipasi itu sendiri. Karena tanpa ketekunan, keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan para penggerak partisipasi tersebut, maka harapan untuk mendapatkan partisipasi tersebut hanyalah sebuah impian yang tidak akan pernah terwujud menjadi kenyataan.

Ada hal-hal yang menarik dan unik dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dalam meningkatkan produktivitas kinerja staf MI Miftahul Huda, agar produk yang dihasilkan layak di jual di masyarakat. Salah satu hal yang menarik hingga sampai sekarang menjadi tradisi MI Miftahul Huda adalah kepala sekolah hadir lebih awal guna menyambut kedatangan guru, siswa, dan pegawainya. Sulit memang bagi pemimpin umumnya tapi itulah faktanya yang dilakukan keseharian kepala madrasah dari M. Zuhrofuddin.

Di MI Miftahul Huda ini dalam menertibkan siswa menggunakan sistem sepak bola, ini yang mungkin sekolah lain tidak ada. Yaitu memberi kartu kuning bagi bagi siswa yang melanggar tata tertib. Anak yang sudah melanggar tata tertib yang sudah dicatat dalam kartu kuning yang dimiliki setiap siswa, takutnya bukan main untuk melakukan

pelanggaran berikutnya. Karena mereka tahu apabila mereka melakukan pelanggaran berikutnya akan diberikan kartu merah, artinya mereka harus keluar. Kiat lain yang menjadi orang tua senang, bahkan berebut masuk di MI Miftahul Huda adalah setiap pagi berdiri di depan pintu masuk kelas. Yang kami lakukan adalah bersalaman dengan semua siswa. Orang tua melihat kami melakukan itu dengan penuh perhatian, umumnya mereka senang melihat apa yang kami lakukan. Pada hal pengakuan sebagian orang tua siswa jarang memperlakukan anak-anaknya seperti itu di rumah mereka. Yang di lakukan sebenarnya di samping silaturahmi adalah meneliti kerapian berpakaian, rambut, dan lainnya. Hal ini kemudian menyebabkan orang tua simpatik, sehingga menyekolahkan anaknya di MI Miftahul Huda.¹²⁵

Dalam kasus yang lain, M. Zuhrofuddin dan musiri memberikan contoh kepada guru dan murid-muridnya. Suatu sikap, yang menurut pemimpin pada umumnya adalah suatu sikap yang tidak wajar, yaitu sikap M Zuhrofuddin menyapu halaman sekolah. Hal ini kemudian mendorong program Jum'at bersih bagi siswa untuk memberihkan lingkungannya.

Dengan program ini, menjadikan anak menyadari bahwa lingkungan yang bersih itu sehat, indah, dan apik. Menjadikan anak penghuninya dalam menerima pelajaran. Siapa pun yang hadir di lingkungan MI Miftahul Huda ini akan senang dan kerasan.¹²⁶

¹²⁵ Dokumentasi MI Miftahul Huda, 2010

¹²⁶ *Ibid.*

Begitu juga ketua BP3 pada saat itu tanpa digaji, keluar masuk rumah orang tua siswa untuk memberikan pemahaman dan penyuluhan pentingnya berpartisipasi terhadap Miftahul Huda.

Begitu juga halnya Musiri, ketua komite, Ia memiliki kesempatan untuk mendapatkan gaji dari komite, tapi kesempatan ini tidak digunakan untuk kepentingan dirinya, Ia lebih memilih mengabdikan dirinya untuk MI Miftahul Huda.

5. Kerangka Totalitas Mewujudkan Partisipasi Masyarakat

Upaya untuk mewujudkan cita-cita sekolah bermutu atau memiliki kualitas kompetitif, MI Miftahul Huda telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung tercapainya cita-cita tersebut. Hal ini melalui sebuah proses dan tahapan-tahapan yang panjang dan secara menyeluruh. Tahapan-tahapan ini secara internal dilakukan melalui perubahan manajemen, administrasi, organisasi, dan kepemimpinan. Secara eksternal elemen-elemen yang mempengaruhi meliputi: pemerintah sebagai sistem penentu kebijakan; masyarakat luas atau orang tua siswa dan siswa itu sendiri; dan sistem budaya masyarakat setempat.

Tahapan-tahapan yang telah dilalui MI Miftahul Huda merupakan satu kesatuan sistem yang utuh. Keutuhan sistem ini kemudian dikenal dengan istilah mutu terpadu (*total quality*). *Total quality* MI Miftahul Huda, dapat ditandai dengan semua sistem yang ada dalam MI Miftahul Huda, yaitu mulai dari kualitas *in put* (siswa, kepala sekolah, guru, pegawai), komite, dan POS, hingga pemerintah dan lingkungan setempat

mendukung sesuai fungsi dan peran masing-masing secara efektif dan efisien. Jika demikian, maka untuk mewujudkan sekolah menjadi sekolah bermutu dengan memiliki partisipasi yang tinggi akan terpenuhi.

Berkaitan dengan totalitas proses dan tahapan MI Miftahul Huda untuk meningkatkan mutu sekolah dan partisipasi tinggi, yang tampak seperti sekarang ini, tidak lepas dari upaya maksimal, kerja seluruh komponen masyarakat. Baik pihak sekolahnya, komitenya, masyarakat turut serta berpartisipasi, lingkungan mendukung, dan kebijakan pemerintah yang kondusif. Dan ini merupakan proses yang panjang, dan semua orang telah mengetahuinya.

Di samping itu, salah satu aspek yang lain adalah aspek keterpaduan. Aspek keterpaduan mulai dari RA, juga memberikan arti penting meningkatnya partisipasi. Bagi pihak sekolah, keterpaduan tidak hanya menguntungkan dari aspek berada dalam satu kompleks. Akan tetapi, keterpaduan juga memberikan keuntungan dalam aspek sistem pengelolaan sekolah, kurikulum, anggaran belanja sekolah, dan lainnya.

Sementara bagi orang tua siswa, keterpaduan akan memudahkan orang tua siswa, terutama bagi orang tua siswa yang memilih untuk menyekolahkan anaknya, di MI Miftahul Huda karena aspek letak yang strategis. Dan juga bagi orang tua siswa yang menginginkan anaknya seperti di RA, sehingga mereka kemudian memasukan anak mereka di MI Miftahul Huda.

D. Analisis Data

Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap MI Miftahul Huda Jati Karanganyar Trenggalek, penerapan MBS tampaknya juga dapat dicermati bersama bahwa, berdasarkan pada data yang diperoleh, dapat dijabarkan hasil penyebaran angket sebagai berikut:

1. Dalam bentuk apakah yang anda berikan kepada MI Miftahul Huda dalam peningkatan mutu pendidikan?

Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi dari jawaban responden, diketahui bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam cara berpartisipasi adalah kurang bervariasi karena dari kelima jawaban hanya tiga jawaban yang menjadi pilihan responden. Sebanyak 14 (tiga belas) responden memilih bentuk partisipasi mereka dengan cara menyumbang uang. Jumlah ini berarti mencapai 29 % dari seluruh responden. Selanjutnya 52 % dari semua responden, yaitu sejumlah 25 orang memilih bentuk partisipasi menyumbang usulan/gagasan sebagai cara berpartisipasi mereka. Ini berarti sebagian besar responden atau lebih dari separuh responden memberikan sumbangan usulan/gagasan. Bentuk ini adalah bentuk termudah dari bentuk-bentuk lainnya. Namun demikian dengan ikut memberikan usulan berarti ada rasa tanggung jawab dari masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sekolah. Pilihan selanjutnya adalah dengan cara bentuk lain, yaitu gabungan antara menyumbang uang dengan usulan/gagasan dan gabungan antara menyumbang tenaga dan usulan/gagasan. Responden yang memilih bentuk ini adalah sejumlah 9 orang atau 19 % dari seluruh responden. Kesimpulan dari penjelasan

tersebut di atas bahwa, sebagian besar responden, yaitu sejumlah 52 % nya memilih untuk menyumbang usulan/gagasan dalam berpartisipasi. Hal ini berarti mempertegas uraian di awal, bahwa bentuk partisipasi tidak lagi diartikan sempit (tidak hanya terbatas pada pembiayaan, pendanaan maupun material). Karena tidak lebih dari jumlah tersebut, yaitu sebanyak 29 % ikut berpartisipasi dengan cara menyumbang uang. Selanjutnya urutan ketiga, yaitu sejumlah 19 % sisanya melakukan partisipasi dengan cara bentuk lain, yaitu gabungan antara menyumbang usulan/gagasan dengan tenaga dan antara menyumbang uang dengan menyumbang usulan/gagasan.

2. Dalam usaha melaksanakan program peningkatan kualitas pendidikan, bentuk kegiatan apa yang akan anda lakukan?

Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi dari jawaban responden, diketahui bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan kegiatan ternyata cukup bervariasi. Sebanyak 22 (sebelas) responden memilih untuk dikerjakan bersama antara sekolah dengan Komite Sekolah. Hal ini berarti sejumlah 45 % dari seluruh responden memilih jawaban tersebut. Selanjutnya 5 % dari jumlah total responden, yaitu sebanyak 2 orang memilih bentuk partisipasi dengan membuat kesepakatan atau aturan tertentu dalam melaksanakan program tersebut. Bentuk selanjutnya adalah dengan diserahkan sekolah dengan dana dari pemerintah dipilih oleh 2 (satu) orang responden. Prosentase jumlah tersebut berarti mencapai 5 % dari seluruh responden. Sejumlah 16% dari

semua responden yaitu sebanyak 8 (delapan) orang memilih jawaban diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa. Untuk pilihan jawaban diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa dan Komite Sekolah merupakan bentuk partisipasi dari 12 orang responden. Jumlah ini berarti mencapai 24 % dari seluruh responden. Sedangkan sisanya, yaitu 2 (dua) orang responden atau 5 % dari 48 responden memilih bentuk lain dalam berpartisipasi. Responden tersebut memilih bentuk partisipasinya dengan mengusulkan baik melalui dana APBD II, APBD I maupun APBN sesuai dengan analisis kebutuhannya. Dari penjelasan tersebut di atas berarti dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden, yaitu sejumlah 45 %nya memilih untuk dikerjakan bersama antara sekolah dengan Komite Sekolah. Hal ini berarti bahwa Komite Sekolah bukanlah sebagai pelengkap saja dalam sebuah sekolah namun telah menjadi partner dalam melaksanakan program peningkatan kualitas pendidikan. Pilihan kedua yaitu diserahkan sekolah dengan dana dari orang tua siswa dan Komite Sekolah merupakan bentuk partisipasi dari sejumlah 24 % responden. Sebagian besar responden memberikan partisipasinya dalam bentuk sumbangan usulan. Sedangkan pada tahap pelaksanaan kegiatan bentuk partisipasinya adalah dengan cara dikerjakan bersama antara sekolah dengan Komite Sekolah.

3. Apakah yang biasanya anda lakukan apabila anda diundang dalam pertemuan Komite Sekolah?

Hasil jawaban responden dijelaskan dalam empat variabel, yaitu kehadiran, keaktifan dalam berdiskusi, keterlibatan dalam kegiatan fiqh dan kesediaan membayar. Dalam kehadiran diketahui bahwa sebagian besar hadir dan menyampaikan pendapat, namun juga ada yang meragukan bahwa pendapat tersebut tidak diperhitungkan. Karena menurut mereka pengambil keputusan ada pada pemegang kekuasaan.

4. Apa motivasi anda dalam mendorong masyarakat ikut berpartisipasi terhadap madrasah?

Jawaban responden bervariasi, untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap sekolah. Karena yang digerakkan dan didorong untuk berpartisipasi terhadap sekolah adalah masyarakat pedesaan, dan salah satu ciri masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang kurang sadar tentang pentingnya dunia pendidikan. Maka untuk menggerakkan kelompok masyarakat model ini adalah dengan menggunakan pendekatan ideologi dan pendekatan spiritual (pendekatan keagamaan, tapi juga harus dengan menggunakan pendekatan-pendekatan lain. Diantara pendekatan lain tersebut adalah pendekatan motivasi kebutuhan pemenuhan diri (*self-fulfilment*). Karena menurut kelompok masyarakat model ini, semangat kejuangan dan spiritual, tapi juga perlu mutu yang kompetitif. Diantara langkah-langkah dan strategi adalah dengan menggunakan pendekatan komunikasi silaturahmi. Komunikasi silaturahmi dibangun melalui pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah orang tua siswa. Langkah-langkah ini ditempuh

untuk meningkatkan empati masyarakat, khususnya orang tua siswa terhadap sekolah. Kemudian langkah-langkah dan strategi selanjutnya, pihak lembaga partisipasi masyarakat dan kepala madrasah membentuk dua lembaga komunikasi baru dengan fungsi dan tugas yang berbeda, yaitu lembaga POS dan Humas. POS merupakan sebuah ikhtiar yang secara khusus membangun komunikasi antara orang tua siswa, guru, murid, dengan sekolah. Sedangkan Humas di samping sebagai lembaga yang membantu komite untuk mendorong komunikasi yang harmonis antara orang tua siswa dengan sekolah dan juga sebagai lembaga untuk membangun komunikasi dengan masyarakat luas. Strategi dan langkah yang digunakan Humas untuk membangun komunikasi adalah dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan. Baik dalam bentuk pemikiran, manajemen pengelolaan sekolah, materi, dan lainnya.

5. Bagaimana usaha yang anda lakukan dalam melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan?

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas tersebut dibutuhkan sistem totalitas administrasi dan totalitas kualitas proses. Totalitas sistemik administrasi dan organisatoris Sementara untuk totalitas kualitas proses mewujudkan pendidikan yang bermutu dan partisipasi tinggi.

E. HASIL ANALISIS

Berdasarkan analisis tersebut, maka upaya peningkatan mutu pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung program sekolah dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah di MI Miftahul Huda menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. MI Miftahul Huda membentuk lembaga partisipasi masyarakat sebagai implementasi MBS yaitu POS (Paguyupan Orang Tua Siswa, Komite Sekolah, Alumni dan Humas yang masing-masing lembaga memiliki peran dan tugas masing-masing.
2. Dari hasil wawancara dengan orang tua dan komite madrasah di dalam Paguyupan Orang tua Siswa (POS) dapat teridentifikasi beberapa hal, baik berupa harapan, keinginan, kebutuhan, maupun potensi-potensi bersama dan kesepakatan-kesepakatan antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung program sekolah dalam rangka MBS. Pada umumnya orang tua dan masyarakat memiliki pemahaman yang tinggi untuk memajukan dan meningkatkan program sekolah yang akan dikembangkan. Hal tersebut dapat terlihat dengan berbagai bentuk partisipasi orang tua dan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya masing-masing, baik partisipasi material maupun non-material, sebagai berikut:
 - a) Partisipasi awal tahun pelajaran 2010/2011 dari siswa kelas I sampai dengan kelas VI adalah 100% SPP masuk.

- b) Terdapat donatur bagi siswa yang kurang mampu sekitar 7% dari jumlah siswa 212, dengan rincian sebagai berikut: 2 orang yatim, 4 orang PHK, 6 orang wiraswasta (kategori tidak menentu), 3 orang pedagang kecil.
- c) Hasil belajar dari 15 siswa yang kurang mampu nampak heterogen, 6 orang dari segi akademik meningkat, 11 orang meningkat pada sisi penyaluran bakat, seperti olahraga, pesantren/agama, keterampilan, kesenian (menggambar dan menari).
3. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam melaksanakan program sekolah dapat memberikan motivasi dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat dalam mensukseskan program sekolah tersebut dengan baik. Partisipasi orang tua dan masyarakat dalam melakukan aktivitas-aktivitas terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan, pengadaan biaya pendidikan, dan aspirasi-aspirasi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah disampaikan dalam POS. Selain itu sekolah berusaha menjaga dan memelihara kondisi pembelajaran sekolah sesuai dengan tuntutan minimum. Keterlibatan orang tua dalam mendukung program sekolah tersebut dapat terlihat sebagai berikut:
- a) Kepedulian orang tua terhadap pembinaan dan belajar siswa meningkat hampir 10% dari hasil belajar siswa.
- b) Bentuk iuran dari orang tua murid sebesar Rp. 20.000,00 per siswa dapat membantu kenaikan honor guru dan dapat membantu setiap kegiatan kreativitas siswa, seperti pada lomba tingkat kecamatan.

4. Membahas laporan pelaksanaan program sekolah yang telah dilaksanakan merupakan kegiatan penting untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi sekolah disertai analisis faktor-faktor penyebabnya. Materi pengendalian dan evaluasi yang diselenggarakan mencakup kinerja manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, mutu belajar mengajar, termasuk kinerja mengajar guru, hasil belajar siswa, disiplin dan tata tertib sekolah, pemanfaatan sumber daya dan dana sekolah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana pada rumusan masalah, tujuan umum, dan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan di MI Miftahul Huda.

Setelah melakukan penelitian dan penelaahan secara mendalam terhadap sejumlah dokumen, hasil observasi, angket dan wawancara MI Miftahul Huda, maka dari hasil penelitian ini secara umum menunjukkan, bahwa MI Miftahul Huda merupakan sekolah yang memiliki kualitas unggul dan memiliki partisipasi yang tinggi.

Sementara hasil penelitian ini secara khusus akan menjawab tiga rumusan masalah penting, yaitu: pertama, bentuk dan lembaga partisipasi masyarakat di MI Miftahul Huda; kedua, upaya lembaga partisipasi masyarakat untuk mendorong masyarakat berpartisipasi terhadap madrasah; dan ketiga, pola kerja lembaga partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu pada kesimpulan ini juga akan diuraikan tiga jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah tersebut di atas sebagai berikut:

1. Bentuk Lembaga Partisipasi Masyarakat di MI Miftahul Huda

Temuan menunjukkan bahwa di MI Miftahul Huda, bentuk partisipasi masyarakat terhadap madrasah diwadahi dalam empat lembaga

partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat luas atau *stakeholders* (pengusaha, masyarakat, orang tua siswa, pihak sekolah, tokoh pendidikan, politik, LSM, dan lainnya) terhimpun dalam Komite Sekolah/Madrasah (KS/M). Untuk komite dibagi dua, yaitu: Badan Pengurus Harian (BPH) dan Badan Kehormatan (BK). BPH lebih fokus pada persoalan membantu kepala sekolah bersama-sama mengelola keuangan sekolah yang transparan, akuntabel dan demokratis, dan menyadarkan masyarakat pentingnya berpartisipasi. Sementara badan kehormatan KS/M kontribusinya lebih pada pengembangan pemikiran kurikulum, proses, dan pemberdayaan SDM.
- b. Partisipasi orang tua siswa secara khusus terhimpun dalam lembaga partisipasi orang tua wali yang disebut dengan Paguyuban Orang Tua Siswa (POS). Lembaga ini secara khusus dibentuk oleh komite dan sekolah sebagai upaya dan strategi untuk menghilangkan citra negatif komite, yang kesannya hanya juru tagih sekolah dan melegitimasi kebijakan kepala sekolah. Sehingga POS dinilai sangat efektif untuk menggalang dana, jasa, barang, dan bentuk materi lainnya dari orang tua siswa.
- c. Partisipasi alumni. Wujud konkrit partisipasi ini di samping materi, tapi juga lebih ditekankan pada publikasi dan pencitraan (*building image*).
- d. Partisipasi masyarakat dalam bentuk patnership atau kerjasama yang mendukung program MI Miftahul Huda yang saling menguntungkan

melalui *public relation* (humas). Wujud partisipasi ini ditekankan pada aspek membangun relasi dan komunikasi kepada semua pihak yang berkepentingan untuk kemajuan bersama yang saling menguntungkan (*symbiosis mutualisme*).

2. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat

Komite dan madrasah melakukan berbagai upaya-upaya dan langkah-langkah strategis untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap sekolah. Secara garis besar ada dua langkah strategis yang digunakan untuk menggerakkan dan mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap MI Miftahul Huda, yaitu:

- a. Pendekatan bahasa Agama dan ideologi. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan pemahaman, kesadaran, dan pentingnya partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Dua pendekatan ini, dinilai lebih efektif dan lebih mudah untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi terhadap madrasah. Faktor ini memiliki implikasi positif dan sangat efektif. Atas nama agama orang rela berkorban apa saja yang ia miliki, hingga diri sekalipun.
- b. Pendekatan motivasi kebutuhan pemenuhan diri (*self-fulfilment*) atau pendekatan mutu. Pendekatan ini digunakan untuk menggerakkan dan mendorong masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan pemahaman yang tinggi terhadap dunia pendidikan. Bahwa masalah kualitas mutu merupakan harapan dan pilihan semua orang. Tidak ada satu pun manusia memilih memasukkan anaknya pada suatu lembaga

apapun tanpa memilih faktor kualitas mutu. Semua orang tua yang memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai agent perubahan (*the change of knowledge*) dan ilmu pengetahuan sebagai energi kekuatan (*the power of knowledge*) bagi putra putrinya, maka masalah biaya tidak menjadi persoalan fundamental untuk memilih sekolah-sekolah yang bermutu dengan partisipasi tinggi. Tipe masyarakat model ini, melihat bahwa anak adalah investasi yang tidak ada nilainya dengan materi lainnya. Sehingga mereka mengeluarkan biaya sebesar apapun, mereka rela, puas, dan senang. Akan tetapi mereka menaruh harapan besar dan selalu menuntut bukti terhadap MI Miftahul Huda yang menawarkan jaminan mutu.

3. Pola Kerja Lembaga Partisipasi Masyarakat

Pola kerja lembaga partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai sekolah yang memiliki kualitas unggul dan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dapat dilihat dua aspek, yaitu:

- a. Aspek totalitas sistem administrasi pengelolaan sekolah, tidak hanya diterapkan dalam satu unit sub sistem manajemen saja, tapi totalitas sistem administrasi adalah penerapan sistem administrasi secara keseluruhan. Penerapan ini dilakukan mulai dari sub-sub sistem atau unit terkecil, hingga pada sub sistem atau unit yang terbesar, yaitu mulai dari sistem administrasi organisasi komite dan madrasah, sistem administrasi tata usaha, manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, humas, dan peserta didik.

b. Aspek tahapan-tahapan totalitas kualitas proses pengelolaan MI Miftahul Huda, sebagai upaya mewujudkan sekolah unggul berpartisipasi tinggi adalah lebih ditekankan pada proses pencapaian mutu sesuai tahapan-tahapan dan berjalan secara seimbang serta secara totalitas. Baik pada tahapan kualitas *input*, *kualitas proses*, kualitas *output*, dan kualitas *out comenya*. Kualitas-kualitas ini kemudian diharapkan akan memberikan manfaat dan dampak positif, bagi komite dan madrasah, orang tua siswa dan siswa itu sendiri, dan masyarakat serta lingkungannya. Hal ini dilakukan untuk mencapai mutu dan adanya jaminan mutu. Jika aspek ini terwujud, maka secara otomatis akan memberikan efek positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat terhadap sekolah tersebut, dan mutu pun akan selalu terjaga.

B. Saran-saran

Pada bagian ini akan diberikan beberapa catatan-catatan penting. Catatan-catatan ini, menurut peneliti dianggap perlu untuk disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan.

1. Lembaga partisipasi masyarakat MI Miftahul Huda hendaknya selalu membandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang bisa dikategorikan sebagai sekolah unggul berpartisipasi tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keunggulan sekolah-sekolah lain non madrasah. Dengan mengetahui keunggulan dan kelemahan sekolah lain, suatu lembaga khususnya MI Miftahul Huda, dapat merumuskan langkah-

- langkah strategis untuk menentukan arah perubahan lebih awal. Hal ini perlu dilakukan mengingat sebagian orang tua siswa selalu membandingkan sekolah di tempat yang lain, kemudian dijadikan dasar untuk memilih sekolah mana yang layak untuk menyekolahkan anak mereka.
2. Untuk madrasah yang tingkat partisipasi dan berkualitas rendah, dapat dijadikan alat evaluasi untuk merubah dan mengembangkan sekolah/madrasah ke depan sebagai sekolah binaan MI Miftahul Huda atau khususnya lembaga yang berkepentingan, sehingga madrasah bersangkutan dapat melakukan pembaruan-pembaruan secara fundamental dan totalitas untuk meningkatkan mutu pendidikannya.
 3. Komite dan madrasah, perlu berikhtiar lebih jauh lagi melakukan langkah-langkah strategis, khususnya menggerakkan dan mendorong kelompok masyarakat luas yang belum tergarap secara optimal, sebagaimana pengalaman yang dilakukan selama ini, perlu memiliki peta masyarakat miskin dan dijadikan sebagai daerah binaan. Atau juga membuka kelas khusus untuk anak jenius dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat elit. Dan juga satu kelas khusus bagi masyarakat miskin yang tidak menyekolahkan anaknya di MI Miftahul Huda, anak berprestasi yang betul-betul tidak mampu secara ekonomi kemudian mencarikan donatur tetap untuk berpartisipasi.
 4. Untuk menggerakkan dunia usaha agar berpartisipasi terhadap MI Miftahul Huda, maka tidak hanya di digunakan pendekatan bahasa Agama dan ideologi, tapi perlu menggunakan pendekatan bahasa kekuasaan. Sehingga

untuk ketua komitenya perlu ditaruh figur-figur yang memiliki kekuasaan politik. Karena untuk menggerakkan kelompok masyarakat ini diperlukan pendekatan kekuasaan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Duhou, Ibtisam, 2002, *School Based Management*, Terjemahan Noriamin Aini Suparto, Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu
- Abu Isa Abdulloh bin Salam, *Ringkasan Syarah Arba'in An-Nawawi - Syaikh Shalih Alu Syaikh Hafizhohulloh*, <http://muslim.or.id>.
- Arifin, Imron, 2000, *Rancangan Studi Kasus Tunggal, Multi Situs dan Multi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif*, Makalah Penelitian Kualitatif bagi Dosen PTAI se-Kopertais Wilayah IV, Malang: Unisma.
- Armstrong, Michel, 1990, *Seri Pedoman Manajemen: Manajemen Sumber Daya Manusia*, Alih Bahasa: Cikmat et.al., Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Asy'ri, Haromain, Imam, 2009, "Pemuda". *Dalam Mimbar Pembangunan Agama*, XXXIX (277), Surabaya: Kanwil Depag Jatim.
- Azwar, Azrul, 1996, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Jakarta: Binurupu Aksara.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2003, *Pedoman Komite Sekolah*, Jakarta, Dirjen Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Agama RI, 1976, *Al - Qur'an dan terjemahan*, Jakarta: Bumi Restu.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2004, *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Jakarta, Dirjen Dikdasmen.
- Drury and Levin, 1995, *School-Based Management*, ERIC Eugene OR.
- Echols, John M. dan Hasan Shadly, 2003, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Fadjar, Malik ,2005, *Holistik Pemikiran Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa

- Faisal, Sanapiah et.all.,2007, ***Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah: Pelajaran dari Lapangan untuk Mewujudkan Visi Direktobinaan SMP***, Malang : UM Press
- Fatah, Nanang,2004, ***Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah***, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Gaspersz, Vincent,1998, ***Manajemen Produktivitas Total: Strategi Peningkatan Produktivitas Bisnis Global***, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Irawan, Ade, et.all., 2004, ***Mendagangkan Sekolah: Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di DKI Jakarta***, Cetakan Pertama, Jakarta : Indonesia Corruption Watch.
- Kayadi,2003, "***Implementasi MPMBS di SMU Negeri 22, Surabaya***
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002, ***tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah***
- Khadiyanto, Parfi, 2007. ***Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru***, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Komisi Nasional Pendidikan, ***Menuju Pendidikan Bermutu dan Merata***, Jakarta: Laporan Komisi Nasional Pendidikan
- Konkon dan Suryatna, 1978. ***Sejarah Azas-Azas dan Teori-Teori Pengembangan Sosial***, Bandung: LP3s IKIP Bandung.
- Mardalis ,1995, ***Metode Penelitian*** : Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta : Bumi Aksara
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, 1992, ***Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru***, Jakarta: UI-Press.
- Millet, John D.,1959, ***Manajemen in The Public Service***, New York: McGraw Hil Book Company Ins.
- Moleong,J.Lexi,1999, ***Metode Penelitian Kualitatif***, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Muhaimin,2006, ***Nuansa Baru Pendidikan Islam***, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mulyasa, 2006, ***Manajemen Berbasis Sekolah***, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cetakan ke Sepuluh.
- Nazir. Moh, 1988, ***Metode Penelitian*** , Jakarta : Ghulia Indonesia

- Nasution. S,1996, "*Metode Research*", Jakarta : Bumi Aksara
- Nurawi, Arrif, 2002, "*Aplikasi manajemen berbasis Sekolah (MBS) pada Madrasah* " Ikhlas Beramal
- Nurkholis, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi*, Jakarta.
- Poerbakawatja, Soegarda. 1981. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Purwanto, Ngalim. 1987. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Richard A.Garton,1975, *School Administration*, (Dubuque Iowa:Wm.C.Brwn Campany).
- Samtono,2006, "*SNBI Manajemen Peningkatan Mutu SMA menuju Sekolah Nasional Bertaraf Internasional*". <http://www.sma1-sltg.sch.id>.
- Susetyo, Benny,2005, *Politik Pendidikan Penguasa*, Yogyakarta: LKiS
- Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni.
- Sa'ud, Udin Syaefudin & Makmun, Abin Syamsuddin,2005, *Perencanaan Pendidikan: Statu Pendekatan Komprehensif*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Slamet,2005," *MBS, Life Skill, KBK, CTL dan Saling Keterkaitannya*" , Pelangi Pendidikan.
- Sugiharto,2003, "*Penerapan MPMBS di SMU Neger I Balapulang Tegal*" Yogyakarta, MSI-UII
- Sukmadinata, Nana Syaodih, et al,2006, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip dan Instrumen)*, Bandung : Refika Aditama
- Suparlan, Y.B, 1990, *Kamus Istilah Pekerjaan Sosial*, Yogyakarta: Kanisius.
- Talizuduhu, Tilaar, H.A.R. 2004. *Manajemen Pendidikan Nasional Kajian Masa Depan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R.,1998, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21*, Cetakan Pertama, Jakarta: Terra Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia, No. 25 Tahun 2000 *tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)*, Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*. XII, Bandung: Citra Umbara

Wijaya, A.W. 1985. *Manusia Indonesia Individu, Keluarga dan Masyarakat*. Palembang: Presindo.

Zamroni, 2000, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta: Bigraf Publishing



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 1

**DAFTAR ANGKET UNTUK KOMITE MADRASAH
SIFAT TERBUKA/BEBAS**

A. Data Pribadi

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Jabatan dalam komite :

B. Pertanyaan seputar aktifitas komite madrasah.

1. Dalam bentuk apakah yang anda berikan kepada MI Miftahul Huda dalam peningkatan mutu pendidikan?
2. Dalam usaha melaksanakan program peningkatan kualitas pendidikan, bentuk kegiatan apa yang akan anda lakukan?
3. Apakah yang biasanya anda lakukan apabila anda diundang dalam pertemuan Komite Sekolah?
4. Apa motivasi anda dalam mendorong masyarakat ikut berpartisipasi terhadap madrasah?
5. Bagaimana usaha yang anda lakukan dalam melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan?

Lampiran 2

**DAFTAR ANGKET UNTUK WALI MURID
SIFAT TERBUKA/BEBAS**

A. Data Pribadi

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :

B. Pertanyaan wali murid.

1. Dalam bentuk apakah yang anda berikan kepada MI Miftahul Huda dalam peningkatan mutu pendidikan?
2. Dalam usaha melaksanakan program peningkatan kualitas pendidikan, bentuk kegiatan apa yang akan anda lakukan?
3. Apakah yang biasanya anda lakukan apabila anda diundang dalam pertemuan Komite Sekolah?
4. Apa motivasi anda dalam mendorong masyarakat ikut berpartisipasi terhadap madrasah?
5. Bagaimana usaha yang anda lakukan dalam melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan?



PROGRAM PASCASARJANA (S2) MAGISTER STUDI ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Fax. (0274) 523637; Website: msi-iii.net; E-mail: info@msi-iii.net

Nomor : 045/PPs-MSI/II/2011
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 4 Februari 2011

Kepada Yth:
Kepala Sekolah MI Miftahul Huda, Jati, Karangen
Di
Trenggalek

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Pascasarjana (S-2) Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : Isnen
NIM : 08913172
Konsentrasi : Pendidikan Islam

adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses penyelesaian Tesis dengan judul:
"Partisipasi Masyarakat terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Analisis terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di MI Miftahul Huda, Jati, Karangen, Trenggalek)".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sekretaris Program,

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag





**LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA JATI
Desa Jati Kec. Karangn Kab. Trenggalek**

SURAT KETERANGAN
Nomor: MI/47/B-2.A-1/II/2011

Berdasarkan Surat Ketua Program S2 Magister studi Islam Universitas Islam Indonesia (MSI-UII) Yogyakarta tanggal 4 Februari 2011, kami telah memberi ijin untuk mengadakan Penelitian (Research) dengan judul : **"PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (Studi Analisis Terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di MI Miftahul Huda Jati Karangn Trenggalek)"** kepada :

Nama : **Isnen**
NIM : **08913172**
Konsentrasi : **Pendidikan Islam**



Mahasiswa tersebut telah mengadakan penelitian (Research) di Madrasah kami pada tanggal 6 Nopember sampai dengan 20 Desember 2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Trenggalek, 12 Februari 2011
Kepala MI Miftahul Huda



MI ZUHROEUDIN, S.Ag

CURRICULUM VITE

A. RIWAYAT PRIBADI

1. Nama lengkap : Isnen, S.Ag
2. Tempat/Tanggal lahir : Trenggalek, 12 Nopember 1975
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : PNS (Guru MI) Pada Kementrian Agama Kab. Trenggalek
6. Alamat Rumah : Desa Karangrejo kec. Kampak Kab. Trenggalek.
7. Pendidikan Terakhir : Sarjana S1/PAI

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Karangrejo , Kec Kampak Kab, Trenggalek, lulus tahun 1989
2. MTsN Kampak, Trenggalek, lulus tahun 1992
3. MAN Trenggalek, lulus tahun 1995
4. D2 Universitas Negeri Malang, lulus tahun 2001
5. S1 STIT Sunan Giri Trenggalek, lulus tahun 1999

C. PENGALAMAN PEKERJAAN

1. Guru MI Hidayatut Tholab Desa Pandean Kec. Dongko Kab. Trenggalek. Tahun 2002 - 2004
2. Guru MIN Kayen , Kec. Karangrejo Trenggalek, Tahun 2004 – 2006
3. Guru MI Karangrejo Kec. Kampak, Kab, Trenggalek, Tahun 2006 sekarang

D. PENGALAMAN LAIN-LAIN

1. Guru MI Karangrejo, Kampak, Trenggalek, Tahun 1997 – 2002
2. Guru/Tutor Paket C Al Hasan Kampak, Trenggalek, Tahun 2001 - 2003